

**KECAMATAN PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES**

**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(CALK 2021)**



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
KECAMATAN PAGUYANGAN**

Jl. Raya Paguyangan No. 64 ☎ (0289) 432196 Paguyangan ✉ 52276
PAGUYANGAN - BREBES

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

1.1.1. Maksud Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Brebes, terutama digunakan untuk membandingkan realisasi pendapatan dan belanja dengan anggaran yang telah ditetapkan, menilai kondisi keuangan, menilai efisiensi dan efektivitas keuangan, dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes mempunyai kewajiban untuk melaporkan pelaksanaan pengelolaan keuangan di lingkungan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1) Akuntabilitas

Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang telah dipercayakan kepada Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.

2) Manajemen

Membantu para pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas dana untuk kepentingan masyarakat.

3) Transparansi

Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

4) Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)

Membantu para pengguna Laporan Keuangan untuk mengetahui apakah penerimaan pada periode pelaporan cukup untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan tidak akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.

1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan SKPD merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas akuntansi.

Tujuan umum Laporan Keuangan SKPD adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, dan kinerja keuangan suatu entitas akuntansi yang bermanfaat bagi entitas pelaporan dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Brebes dalam penyusunan Laporan Keuangan Daerah dan para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Tujuan spesifik Laporan Keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas akuntansi atas sumber daya yang dipercayakan kepadanya, dengan:

- 1) menyediakan informasi mengenai kecukupan penerimaan periode berjalan untuk membiayai seluruh pengeluaran;
- 2) menyediakan informasi mengenai kesesuaian cara memperoleh sumber daya ekonomi dan alokasinya dengan anggaran yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
- 3) menyediakan informasi mengenai jumlah sumber daya ekonomi yang digunakan dalam kegiatan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes serta hasil-hasil yang telah dicapai;
- 4) menyediakan informasi mengenai bagaimana Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes mendanai seluruh kegiatannya dan mencukupi kebutuhan kasnya;
- 5) menyediakan informasi mengenai posisi keuangan dan kondisi Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes berkaitan dengan sumber-sumber penerimaannya, baik jangka pendek maupun jangka panjang, termasuk yang berasal dari pungutan pajak dan retribusi;
- 6) menyediakan informasi mengenai perubahan posisi keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes apakah mengalami kenaikan atau penurunan, sebagai akibat kegiatan yang dilakukan selama periode pelaporan.

Untuk memenuhi tujuan-tujuan tersebut, Laporan Keuangan menyediakan informasi mengenai pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, aset, kewajiban, ekuitas dana Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes sebagai suatu entitas pelaporan.

Laporan Keuangan ini terdiri dari :

- a) Laporan Realisasi Anggaran ;
- b) Neraca ;
- c) Laporan Operasional ;
- d) Laporan Perubahan Ekuitas;
- e) Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh(Nama SKPD) Kabupaten Brebes yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Laporan Realisasi Anggaran menyajikan sekurang-kurangnya unsur-unsur sebagai berikut :

- a) Pendapatan;

- b) Belanja;
- c) Transfer ;
- d) Surplus/Defisit ;
- e) Pembiayaan ;
- f) Sisa Lebih /Kurang Pembiayaan Anggaran

Neraca

Neraca Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes merupakan laporan yang menggambarkan posisi keuangan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal tertentu. Kami mengklasifikasikan aset dalam aset lancar dan non lancar serta mengklasifikasikan kewajiban menjadi kewajiban jangka pendek dan jangka panjang dalam neraca. Kami mengungkapkan setiap pos aset dan kewajiban yang mencakup jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima atau dibayar kembali dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan dan jumlah-jumlah yang diharapkan akan diterima kembali atau dibayar kembali dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Neraca mencantumkan sekurang-kurangnya pos-pos berikut :

- a) Kas dan setara kas ;
- b) Investasi jangka pendek ;
- c) Piutang pajak dan bukan pajak ;
- d) Persediaan ;
- e) Investasi jangka panjang ;
- f) Aset tetap ;
- g) Kewajiban jangka pendek ;
- h) Kewajiban jangka panjang ;
- i) Ekuitas.

Laporan Operasional

Laporan Operasional (LO), yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyajikan pos-pos sebagai berikut :

- a) Pendapatan-LO dari Kegiatan Operasional;
- b) Beban dari Kegiatan Operasional;
- c) Surplus/defisit dari Kegiatan Non Operasional;
- d) Surplus/defisit-LO

Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes menyajikan penjelasan naratif, analisis atau daftar terinci atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

Agar dapat digunakan oleh pengguna dalam memahami dan membandingkannya dengan laporan keuangan entitas lainnya, Catatan atas Laporan Keuangan sekurang-kurangnya disajikan dengan susunan sebagai berikut :

- a. Informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi makro, pencapaian target Kinerja APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Ihktisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.

Catatan atas Laporan Keuangan disajikan secara sistematis setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas.

1.2. LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan keuangan diselenggarakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569) ;
3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
9. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) ;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4027) ;Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4139) ;

17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pada Pemerintah Daerah ;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah.
26. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;
27. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021 ;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2021 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;
30. Peraturan Bupati Brebes Nomor 103 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;

31. Peraturan Bupati Brebes Nomor 65 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2021;
32. Peraturan Bupati Kabupaten Brebes Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Sesuai Peraturan Bupati Brebes Nomor 108 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Brebes Nomor 062 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Brebes, maka sistematika isi Catatan atas Laporan Keuangan disusun adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan		
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD	
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD	
Bab II	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD		
	2.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD	
	2.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan	
Bab III	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD		
	3.1	LRA	
		3.1.1	Pendapatan_LRA
		3.1.2	Belanja
	3.2	LO	
		3.2.1	Pendapatan –LO
		3.2.2	Beban
		3.2.3	Kegiatan Non Operasional
		3.2.4	Pos Luar Biasa
	3.3	Laporan Perubahan Ekuitas	
		3.3.1	Perubahan Ekuitas
	3.4	Neraca	
		3.4.1	Aset
		3.4.2	Kewajiban
		3.4.3	Ekuitas

	3.5	Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang rnenggunakan basis akrual pada Pemda.
Bab IV	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab V	Penutup	

BAB II

IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN SKPD

2.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan SKPD

Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes pada dasarnya memuat ikhtisar realisasi pencapaian target Kinerja APBD. Target kinerja APBD tersebut merupakan gambaran realisasi pencapaian efektif dan efisien pelaksanaan Program dan Kegiatan yang dilaksanakan pada tahun anggaran 2019.

Untuk memberikan gambaran secara jelas ikhtisar pencapaian kinerja keuangan dapat dilihat pada tabel bawah ini :

1. Tabel pencapaian target dan realisasi pendapatan

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pendapatan Asli Daerah	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00%
2	Pendapatan Transfer	-	-	-	-
3	Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	-	-	-	-
	JUMLAH PENDAPATAN	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00%

Dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan Asli Daerah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	PENDAPATAN ASLI DAERAH				
1	Pajak Daerah	-	-	-	
2	Retribusi Daerah	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00%
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan			-	
4	Lain-lain PAD yang Sah			-	
	Jumlah PAD	2.000.000,00	-	(2.000.000,00)	0,00%

b. Pendapatan Transfer

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-DANA BERIMBANGAN				

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	Dana Bagi Hasil Pajak			-	
2	Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam			-	
3	Dana Alokasi Umum			-	
4	Dana Alokasi Khusus			-	
	Jumlah	-	-	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PUSAT-LAINNYA				
1	Dana Otonomi Khusus			-	
2	Dana Penyesuaian			-	
	Jumlah	-	-	-	
	TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI				
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak			-	
2	Pendapatan Bagi Hasil Lainnya			-	
	Jumlah	-	-	-	
	Jumlah Pendapatan Transfer	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Lain-lain Pendapatan yang Sah

NO	URAIAN JENIS PENDAPATAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
	LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH				
1	Pendapatan Hibah			-	
2	Pendapatan Dana Darurat			-	
3	Pendapatan Lain-lain			-	
	Jumlah Lain-lain Pendapatan yang Sah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran pendapatan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi pendapatan sebesar Rp. NIHIL dari target yang ditetapkan Rp. NIHIL atau NIHIL %.
- 2) Realisasi pendapatan NIHIL lebih/(kurang) dari anggaran.

2. Tabel pencapaian target dan realisasi belanja

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Belanja Pegawai	2.199.980.210,00	2.156.974.956,00	(43.005.254,00)	98,05%

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
2	Belanja Barang dan Jasa	490.740.020,00	429.182.071,00	(61.557.949,00)	87,46%
3	Belanja Modal	-	-	-	-
	Jumlah	2.690.720.230,00	2.586.157.027,00	(104.563.203,00)	96,11%

Kinerja mengenai anggaran belanja dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Realisasi Belanja Pegawai sebesar Rp. 2.156.974.956 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 2.199.980.210 atau 98,05%.
- b. Realisasi Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 429.182.071 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 490.740.020 atau 87,46%.
- c. Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 0 dari anggaran yang ditetapkan Rp. 0 atau 0%.

Secara keseluruhan realisasi belanja mencapai 96% dari yang dianggarkan.

3. Tabel pencapaian target dan realisasi pembiayaan (khusus SKPKD)

a. Penerimaan Pembiayaan

NO	URAIAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
2	Pencairan Dana Cadangan				
3	Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan				
4	Penerimaan Pinjaman Daerah				
5	Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
6	Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran penerimaan pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi SILPA sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan Rp atau NIHIL %.
- 2) Realisasi Pencairan Dana Cadangan sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL %.

- 3) Realisasi Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 4) Realisasi Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 5) Realisasi Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 6) Realisasi Penerimaan Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.

Secara keseluruhan realisasi penerimaan pembiayaan mencapai NIHIL % dari yang dianggarkan.

b. Pengeluaran Pembiayaan

NO	URAIAN PENGELUARAN PEMBIAYAAN	ANGGARAN	REALISASI	LEBIH / (KURANG)	%
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6
1	Pembentukan Dana Cadangan				
2	Penyertaan Modal Daerah				
3	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				
4	Pemberian Pinjaman Daerah				
5	Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
	Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Kinerja mengenai anggaran pengeluaran pembiayaan dari tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Realisasi Pembentukan Dana Cadangan sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 2) Realisasi Penyertaan Modal sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 3) Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 4) Realisasi Pemberian Pinjaman Daerah sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.
- 5) Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan sebesar RpNIHIL dari anggaran yang ditetapkan RpNIHIL atau NIHIL%.

Secara keseluruhan realisasi pengeluaran pembiayaan mencapai NIHIL % dari yang dianggarkan.

2.2 Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian Target yang telah ditetapkan.

- 1. Aspek keuangan, sebagai unsur penunjang pelaksanaan kegiatan SKPD Kecamatan Paguyangan dirasakan masih perlu ditingkatkan.**
- 2. Volume pekerjaan semakin bertambah, kemampuan melaksanakan tugas belum maksimal mengimbangi tuntutan pelayanan kepada masyarakat.**
- 3. Terkait masih kurangnya volume pekerjaan yang semakin bertambah untuk menunjang pelayanan perlu ditingkatkan dengan fasilitas yang cukup.**

BAB III

PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN

3.1. RINCIAN DAN PENJELASAN MASING-MASING POS PELAPORAN KEUANGAN SKPD

PENJELASAN POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

3.1.1 Pendapatan

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana lancar yang merupakan hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar lagi oleh daerah. Ikhtisar Pendapatan Daerah yang dikelola oleh Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Pendapatan Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pendapatan Asli Daerah (PAD)	2.000.000,00	-	0,00%	481.339,00
b. Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			-	
c. Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			-	
Jumlah	2.000.000,00	-	0,00%	481.339,00

Dibandingkan dengan realisasi pendapatan Tahun 2020, maka realisasi pendapatan yang dikelola Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes Tahun 2021 tidak mengalami kenaikan/penurunan/NIHIL atau 0%.

Realisasi masing-masing Pendapatan Daerah dapat dijelaskan pada uraian dibawah ini:

1. Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang dikelola Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. 2.000.000 Realisasi sebesar Rp. 0 atau 0%. Realisasi secara rinci dengan komposisi sebagai berikut:

Pendapatan Asli Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pajak Daerah			-	
b. Retribusi daerah	2.000.000,00	-	0,00	481.339,00
c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah			-	
d. Lain-Lain PAD yang sah			-	
Jumlah	2.000.000,00	-	0,00	481.339,00

a. Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi pendapatan dari pajak daerah kurang/melebihi target sebesar NIHIL atau realisasi mencapai RpNIHIL .

Realisasi secara rinci dapat dirinci sebagai berikut :

Pendapatan Pajak Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pajak Hotel				
Pajak Restoran				
Pajak Hiburan				
Pajak Reklame				
Pajak Penerangan Jalan				
Pajak Parkir				
Pajak Air Tanah				
Pajak Sarang Burung Walet				
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan				
Pajak Bumi dan Bangunan				
Pajak Lingkungan				
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan retribusi daerah yang dikelola Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes dapat terealisasi Rp0 atau 0% dari target sebesar Rp . 2.000.000sebagaimana rincian berikut:

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Perizinan Tertentu	2.000.000,00	-	0,00	481.339,00
Jumlah	2.000.000,00	-	0,00	481.339,00

Realisasi secara rinci dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Retribusi Jasa Umum

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Umum				
Retribusi Pelayanan Kesehatan				
Retribusi Pelayanan Persampahan/ Kebersihan				

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Pelayanan Pemakaman dan Pengabuan Mayat				
Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum				
Retribusi Pelayanan Pasar				
Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor				
Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran				
Retribusi Penggantian Biaya Cetak Peta				
Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus				
Retribusi Pengolahan Limbah Cair				
Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang				
Retribusi Pelayanan Pendidikan				
Retribusi Pengawasan dan Pengendalian Menara Telekomunikasi				
Retribusi Pelayanan Kependudukan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Retribusi Jasa Usaha

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Jasa Usaha				
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah				
Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan				
Retribusi Tempat Pelelangan				
Retribusi Terminal				
Retribusi Tempat Khusus Parkir				
Retribusi Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Vila				
Retribusi Rumah Potong Hewan				
Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan				
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga				
Retribusi Penyeberangan di Air				
Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3) Retribusi Perizinan Tertentu

Pendapatan Retribusi Daerah	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Retribusi Perizinan Tertentu				
Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	1.000.000,00	-	0,00	481.339,00
Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman			-	
Retribusi Izin Trayek untuk Menyediakan Pelayanan Angkutan Umum			-	
Retribusi Izin Usaha Perikanan			-	
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas	1.000.000,00	-	0,00	-
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA)			-	
Pemberian Izin Gangguan tempat Usaha/Kegiatan			-	
Jumlah	2.000.000,00	-	0,00	481.339,00

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Penerimaan dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah sebesar RpNIHIL dari yang direncanakan sebesar RpNIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN	-	-		-
Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD	-	-		-
Bagian Laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Milik Swasta	-			-
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Rincian bagian laba sebagai berikut :

Nama BUMN/BUMD/Perusahaan Swasta	Realisasi 2021
PT. Bank Jateng	
PD Bank Brebes	
BKK Banjarharjo	
BKK Jateng	
PD Air Minum Tirta Husada (PDAM)	
PD Percetakan	
PD Farmasi	
PRPP	
Jumlah	NIHIL

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Penerimaan dari Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah adalah sebesar Rp dari yang direncanakan sebesar Rp atau % dengan rincian sebagai berikut :

Lain-Lain PAD yang Sah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Hasil Penjualan BMD Yang Tdk Dipisahkan	-	-	-	-
Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Hasil Kerja Sama Daerah	-	-	-	-
Jasa Giro Kas Daerah	-	-	-	-
Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-
Pendapatan Bunga	-	-	-	-
Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah	-	-	-	-
Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	-	-	-	-
Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah terhadap Mata Uang Asing	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pajak Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Denda Retribusi Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan	-	-	-	-
Pendapatan dari Pengembalian	-	-	-	-
Pendapatan BLUD	-	-	-	-
Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang tidak Dipisahkan	-	-	-	-
Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)	-	-	-	-
Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir	-	-	-	-
Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)	-	-	-	-
Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah	-	-	-	-
Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf	-	-	-	-
Lain-lain PAD yang Sah Lainnya - LRA	-	-	-	-
Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum - LRA	-	-	-	-
Pendapatan dari Angsuran/Cicilan Penjualan - LRA	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

2. Pendapatan Transfer

Pendapatan Transfer Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar Rp. NIHIL. Realisasi sebesar Rp. NIHIL atau NIHIL%. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Pendapatan Transfer :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat				
Pendapatan Transfer Antar Daerah				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL-

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Dana Perimbangan				
Dana Insentif Daerah (DID)				
Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur				
Dana Keistimewaan				
Dana Desa				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Dana Perimbangan tahun 2021 berupa :
 DTU-Dana Bagi Hasil sebesar Rp
 DTU-Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp
 DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp
 DTU-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik sebesar Rp
- 2) Dana Insentif Daerah (DID) sebesar Rp
- 3) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur sebesar Rp
- 4) Dana Keistimewaan sebesar Rp
- 5) Dana Desa sebesar Rp
 Rincian penerimaan Dana Desa per Desa sesuai lampiran ...

b. Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah

Pendapatan Transfer Antar Daerah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Bagi Hasil				
Bantuan Keuangan				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Provinsi berupa :
 - a) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp
 - b) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp
 - c) Bagi Hasil Pajak sebesar Rp
- 2) Pendapatan Bantuan Keuangan berupa :
 - a) Bantuan Keuangan Umum dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp
 - b) Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi sebesar Rp

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Kabupaten Brebes setelah Perubahan Anggaran ditargetkan sebesar RpNIHIL Realisasi sebesar RpNIHIL atau NIHIL%. Realisasi secara rinci dengan sebagai berikut:

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah				
Dana Darurat				
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan Hibah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat				
Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya				
Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri				
Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri				
Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Pendapatan hibah dari pemerintah pusat berupa sebesar Rp
- 2) Pendapatan hibah dari pemerintah daerah lainnya berupa sebesar Rp
- 3) Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri berupa sebesar Rp
- 4) Pendapatan Hibah dari Badan/Lembaga/ Organisasi Dalam Negeri/Luar Negeri berupa sebesar Rp
- 5) Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis berupa sebesar Rp

b. Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2021 berupa dianggarkan sebesar Rp..... terealisasi sebesar Rp..... atau%

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Pendapatan Hibah Dana BOS				
Pendapatan atas Pengembalian Hibah				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

1) Pendapatan Dana BOS tahun 2021 berupa :

- a) BOS Reguler sebesar Rp
- b) BOS Afiriasi sebesar Rp
- c) BOS Kinerja sebesar Rp

2) Pendapatan atas Pengembalian Hibah berupa sebesar Rp ...

3.1.2 Belanja

Belanja Daerah adalah semua Pengeluaran Kas Daerah dalam periode Tahun Anggaran 2021 yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan daerah, meliputi semua pengeluaran yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran sebesar Rp. 2.586.157.027 dari anggaran Rp. 2.690.720.230 dengan perincian sebagai berikut :

Belanja :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Operasi	2.690.720.230,00	2.586.157.027,00	96,11%	2.578.984.643,00
b. Belanja Modal	-	-	-	107.470.000,00
c. Belanja Tak Terduga				
d. Belanja Transfer				
Jumlah	2.690.720.230,00	2.586.157.027,00	96,11%	2.686.454.643,00

1. Belanja Operasi

Belanja Operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari pemerintah daerah yang terdiri atas belanja pegawai, belanja barang dan jasa, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial. Dalam Tahun Anggaran 2021 Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes merealisasikan belanja operasi sebesar Rp. 2.586.157.027

dari anggaran sebesar Rp. 2.690.720.230 Komposisi realisasi belanja operasi sebagai berikut :

Belanja Operasi :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Pegawai	2.199.980.210,00	2.156.974.956,00	98,05%	1.834.401.497,00
Belanja Barang dan Jasa	490.740.020,00	429.182.071,00	87,46%	744.583.146,00
Belanja Bunga				
Belanja Subsidi				
Belanja Hibah				
Belanja Bantuan Sosial				
Jumlah	2.690.720.230,00	2.586.157.027,00	96,11%	2.578.984.643,00

a. Rincian/penjelasan Belanja Pegawai sebagai berikut :

Belanja Pegawai :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Gaji dan Tunjangan	1.489.411.530,00	1.465.491.545,00	98,39%	1.468.691.918
b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN	710.568.680,00	691.483.411,00	97,31%	365.709.579
c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN				
d. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD				
e. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH				
f. Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH				
g. Belanja Pegawai BOS				
h. Belanja Pegawai BLUD				
Jumlah	2.199.980.210,00	2.156.974.956,00	98,05%	1.834.401.497,00

- 1) Belanja Pegawai BOS sebesar Rp terdiri dari :
 - a) Belanja Pegawai BOS pada Satdikdas sebesar Rp
 - b) Belanja Pegawai BOS pada Satdikmen sebesar Rp
- 2) Belanja Pegawai BLUD sebesar Rp terdiri dari :
 (*untuk BLUD RSUD penjelasan disesuaikan*)
 - a) Puskesmas sebesar Rp
 - b) Puskesmas sebesar Rp
 - c) Puskesmas sebesar Rp
 - d) Puskesmas sebesar Rp
 - e) Puskesmas sebesar Rp
 - f) Puskesmas sebesar Rp

b. Rincian/penjelasan Belanja Barang dan Jasa sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang	140.195.020,00	138.393.360,00	98,71%	151.223.070
b. Belanja Jasa	229.070.000,00	216.817.093,00	94,65%	316.501.151
c. Belanja Pemeliharaan	31.435.000,00	26.535.000,00	84,41%	1.550.000
d. Belanja Perjalanan Dinas	90.040.000,00	47.436.618,00	52,68%	106.184.265
e. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
f. Belanja Barang dan Jasa BOS				
g. Belanja Barang dan Jasa BLUD				
J u m l a h	490.740.020,00	429.182.071,00	87,46%	575.458.486,00

- 1) Belanja Barang merupakan belanja barang persediaan sesuai rincian sebagai berikut :

Belanja Barang dan Jasa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Barang Pakai Habis	140.195.020,00	138.393.360,00	98,71%	151.223.070,00
b. Belanja Barang Tak Habis Pakai				
c. Belanja Barang Bekas Dipakai				
J u m l a h	140.195.020,00	138.393.360,00	98,71%	151.223.070,00

Penjelasan :

Rincian Belanja Barang Pakai Habis disajikan pada **lampiran 3.1.1**

- 2) Belanja Jasa sebesar Rp. 216.817.093 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jasa :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Jasa Kantor	229.070.000,00	216.817.093,00	94,65%	316.501.151,00
b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi				
c. Belanja Sewa Tanah				
d. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	-	-		
e. Belanja Sewa Gedung dan Bangunan				
f. Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi				
g. Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya				

Belanja Jasa :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
h. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi				
i. Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi				
j. Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)				
k. Belanja Beasiswa Pendidikan PNS				
l. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan				
m. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Pajak Daerah				
n. Belanja Jasa Insentif bagi Pegawai Non ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah				
J u m l a h	229.070.000,00	216.817.093,00	94,65 %	316.501.151,00

3) Belanja Pemeliharaan sebesar Rp. 26.535.000 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Pemeliharaan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Pemeliharaan Tanah				
b. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	31.435.000,00	26.535.000,00	84,41%	1.550.000,00
c. Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				
d. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				
J u m l a h	31.435.000,00	26.535.000,00	84,41 %	1.550.000,00

4) Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp. 47.436.618 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Perjalanan Dinas :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	90.040.000,00	47.436.618,00	52,68%	106.184.265,00
b. Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri				

J u m l a h	90.040.000,00	47.436.618,00	52,68%	106.184.265,00
--------------------	----------------------	----------------------	---------------	-----------------------

- 5) Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Uang/Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
b. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat				
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- 6) Belanja Barang dan Jasa BOS sebesar Rp terdiri dari :

- Belanja Barang dan Jasa Satdikdas sebesar Rp
- Belanja Barang dan Jasa Satdikmen sebesar Rp

- 7) Belanja Barang dan Jasa BLUD sebesar Rp terdiri dari :

(untuk *BLUD RSUD penjelasan disesuaikan*)

- Puskesmas sebesar Rp
- Puskesmas sebesar Rp
- Puskesmas sebesar Rp
- Puskesmas sebesar Rp
- Puskesmas sebesar Rp
- Puskesmas sebesar Rp

- c. Realisasi Belanja Bunga sebesar RpNIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bunga :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat				
b. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain				
c. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)				
d. Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)				
e. Belanja Bunga Utang Kepada Masyarakat (Obligasi)				
f. Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD				

Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------

Penjelasan :

- 1) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bank merupakan bunga atas pinjaman dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp
- 2) Belanja Bunga Utang Pinjaman Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank merupakan bunga atas pinjaman dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank sebesar Rp ...
- 3) Belanja Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD merupakan bunga atas pinjaman BLUD untuk yang dibayarkan kepada Lembaga Keuangan Bank sebesar Rp ...

d. Realisasi belanja Subsidi adalah NIHIL

e. Realisasi Belanja Hibah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Hibah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat				
b. Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya				
c. Belanja Hibah kepada BUMN				
d. Belanja Hibah kepada BUMD				
e. Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia				
f. Belanja Hibah Dana BOS				
g. Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat diberikan dalam bentuk :
 - a) Uang, merupakan uang sebesar Rp
 - b) Barang, merupakan hibah sebesar Rp
Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Pusat disampaikan pada **lampiran 3.1.2**
 - c) Jasa, merupakan jasa sebesar Rp
- 2) Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya diberikan dalam bentuk :
 - a) Uang, merupakan uang sebesar Rp
 - b) Barang, merupakan hibah sebesar Rp
Rincian Barang Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya disampaikan pada **lampiran 3.1.2**
 - c) Jasa, merupakan jasa sebesar Rp
- 3) Belanja Hibah kepada BUMN diberikan dalam bentuk :
 - a) Uang, merupakan uang sebesar Rp
 - b) Barang, merupakan hibah sebesar Rp

Rincian Barang Hibah kepada BUMN disampaikan pada **lampiran 3.1.2**

- c) Jasa, merupakan jasa sebesar Rp
- 4) Belanja Hibah kepada BUMD diberikan dalam bentuk :
- a) Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
- b) Barang, merupakan hibah sebesar Rp
- Rincian Barang Hibah kepada BUMD disampaikan pada **lampiran 3.1.2**
- c) Jasa, merupakan jasa sebesar Rp
- 5) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia diberikan dalam bentuk :
- a) Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
- b) Barang, merupakan hibah sebesar Rp
- Rincian Barang Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia disampaikan pada **lampiran 3.1.2**
- c) Jasa, merupakan jasa sebesar Rp
- 6) Belanja Hibah Dana BOS sebesar Rp diberikan kepada satdikdas negeri serta satdikdas, satdikmen dan satdiksus swasta sesuai **lampiran 3.1.3**
- 7) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politikdianggarkan sebesar Rp terealisasi sebesar Rp atau %. Rincian disajikan dalam tabel berikut ini :

Nama Partai	Realisasi 2021 (Rp)
a. Partai ...	
b. Partai ...	
c. Partai ...	
d. Partai ...	
J u m l a h	NIHIL

- f. Realisasi Belanja Bantuan Sosial sebesar Rpdengan rincian sebagai berikut :

Belanja Bantuan Sosial :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu				
b. Belanja Bantuan Sosial kepada Keluarga				
c. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat				
d. Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya)				
J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- 1) Belanja Bantuan Sosial kepada individu diberikan dalam bentuk :
- a. Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
- b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp

Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Individu disampaikan pada **lampiran 3.1.4**

- 2) Belanja Bantuan Sosial kepada keluarga diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
 Rincian Barang Bantuan Sosial kepada keluarga disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 3) Belanja Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
 Rincian Barang Bantuan Sosial kepada kelompok masyarakat disampaikan pada **lampiran 3.1.4**
- 4) Belanja Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya diberikan dalam bentuk :
 - a. Uang, merupakan uang..... sebesar Rp
 - b. Barang, merupakan bantuan sosial sebesar Rp
 Rincian Barang Bantuan Sosial kepada Lembaga Non Pemerintahan (Bidang Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya disampaikan pada **lampiran 3.1.4**

2. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi berupa pengeluaran untuk perolehan aset tanah, gedung dan bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan, dan aset tetap lainnya serta belanja modal aset tidak berwujud. Realisasi belanja modal dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 0 dari anggaran sebesar Rp. 0 dengan rincian:

Belanja Modal :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Tanah				
b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin				
c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan				107.470.000
d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi				
e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	107.470.000

- a. Belanja Modal Tanah
Belanja Modal Tanah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Modal Tanah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Tanah				

Belanja Modal Tanah :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
b. Belanja Modal Tanah BLUD				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

1) Belanja Modal Tanah meliputi :

- a) Tanah sebesar Rp
- b) Tanah sebesar Rp
- c) Tanah sebesar Rp

2) Belanja Modal Tanah BLUD meliputi :

- a) Tanah sebesar Rp
- b) Tanah sebesar Rp
- c) Tanah sebesar Rp

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin sebesar Rp NIHIL dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Alat Besar				
b. Belanja Modal Alat Angkutan				
c. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur				
d. Belanja Modal Alat Pertanian				
e. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga				
f. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar				
g. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan				
h. Belanja Modal Alat Laboratorium				
i. Belanja Modal Komputer				
j. Belanja Modal Alat Eksplorasi				
k. Belanja Modal Alat Pengeboran				
l. Belanja Modal Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian				
m. Belanja Modal Alat Bantu Eksplorasi				
n. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja				
o. Belanja Modal Alat				

Belanja Peralatan dan Mesin :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Peraga				
p. Belanja Modal Peralatan Proses/Produksi				
q. Belanja Modal Rambu-Rambu				
r. Belanja Modal Peralatan Olahraga				
s. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS				
t. Belanja Modal Peralatan dan Mesin BLUD				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Belanja Modal Gedung dan Bangunan sebesar Rp 0 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Gedung dan Bangunan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Bangunan Gedung				107.470.000
b. Belanja Modal Monumen				
c. Belanja Modal Bangunan Menara				
d. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti				
e. Belanja Modal Gedung dan Bangunan BLUD				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	107. 470.000

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Jalan, Jaringan, dan Irigasi :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Jalan dan Jembatan				
b. Belanja Modal Bangunan Air				
c. Belanja Modal Instalasi				
d. Belanja Modal Jaringan				
e. Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi BLUD				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Belanja Aset Tetap Lainnya :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Modal Bahan Perpustakaan				
b. Belanja Modal Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga				
c. Belanja Modal Hewan				
d. Belanja Modal Biota Perairan				
e. Belanja Modal Tanaman				
f. Belanja Modal Barang Koleksi Non Budaya				
g. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BOS				
h. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya BLUD				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Belanja Tak Terduga(khusus untuk SKPKD)

Belanja Tak Terduga adalah belanja yang dialokasikan untuk penanganan akibat dari bencana alam, bencana sosial, dan pelaksanaan kewenangan daerah. Realisasi belanja tak terduga dalam Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp.

Belanja Tidak Terduga :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Belanja Tak Terduga				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penggunaan Belanja Tak Terduga meliputi :

- a. Penggunaan untuk penanganan COVID-19 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT COVID-19	Realisasi 2021
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		

No	Uraian BTT COVID-19	Realisasi 2021
9		
10		
	Jumlah	NIHIL

- b. Penggunaan untuk penanganan darurat bencana dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Darurat Bencana :	Realisasi 2021
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	NIHIL

- c. Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Uraian BTT Pengembalian Pendapatan :	Realisasi 2021
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
	Jumlah	NIHIL

4. Belanja Transfer(khusus untuk SKPKD)

Belanja Transfer merupakan transfer bagi hasil ke desa yang meliputi bagi hasil pajak dan bagi hasil retribusi dan bantuan keuangan. Realisasi Belanja Transfer pada Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp dari anggaran sebesar Rp.

Belanja Transfer :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bagi Hasil				
b. Belanja Bantuan Keuangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten				
b. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kota				
c. Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

- b. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa, dijelaskan sesuai tabel berikut :

Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.1.3 Pembiayaan (khusus untuk SKPKD)

1. Penerimaan Pembiayaan

Penerimaan Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp NIHIL dijelaskan sesuai tabel berikut :

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya				
b. Pencairan Dana Cadangan				
c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang				

Penerimaan Pembiayaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
Dipisahkan				
d. Penerimaan Pinjaman Daerah				
e. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah				
f. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Penerimaan Pembiayaan sebagai berikut :

- SiLPA tahun sebelumnya terealisasi sebesar Rp
- Pencairan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp merupakan dana cadangan untuk pembangunan
- Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp merupakan penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan pada BUMD
- Penerimaan Pinjaman Daerah sebesar Rp merupakan pinjaman kepada untuk keperluan dengan jangka waktu
- Penerimaan kembali pinjaman daerah sebesar Rp merupakan penerimaan atas pokok piutang dana bergulir pada SKPD dengan rincian sesuai tabel berikut :

Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah :	Realisasi 2021
a. Dinas Pertanian Ketahanan Pangan	
b. Dinas Koperasi Usaha Mikro dan Perdagangan	
c. Dinas Peternakan	
d. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja	
Jumlah	NIHIL

- Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp merupakan

2. Pengeluaran Pembiayaan

Pengeluaran Pembiayaan tahun 2021 sebesar Rp NIHIL dijelaskan sesuai tabel berikut :

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Pembentukan Dana Cadangan				
b. Penyertaan Modal Daerah				
c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo				

Pengeluaran Pembiayaan	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
d. Pemberian Pinjaman Daerah				
e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang- Undangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penjelasan Pengeluaran Pembiayaan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Dana Cadangan terealisasi sebesar Rp merupakan dana cadangan untuk pembangunan
- b. Penyertaan Modal Daerah sebesar Rp merupakan penyertaan modal kepada BUMD dengan rincian sebagai berikut :

Penyertaan Modal Daerah :	Realisasi 2021
a. PT Bank Jateng Cabang Brebes	
b. BKK Jateng	
c. BKK Brebes	
d. BKK Banjarharjo	
e. Perumda BPR Bank Brebes	
f. Perumda Air Minum Tirta Baribis (PDAM)	
g. Perusda Percetakan Puspa Grafika	
h. dst ...	
Jumlah	NIHIL

- c. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo sebesar Rp merupakan pembayaran atas pokok pinjaman kepada untuk keperluan dengan jangka waktu
- d. Pemberian pinjaman daerah sebesar Rp merupakan pemberian atas investasi.....
- e. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan sebesar Rp merupakan

3. Pembiayaan Netto

Pembiayaan netto merupakan selisih dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Terealisasi sebesar Rp dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp atau %. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

Pembiayaan :	Anggaran 2021	Realisasi 2021	Rasio %	Realisasi 2020
a. Penerimaan Pembiayaan				
b. Pengeluaran Pembiayaan				
Pembiayaan Netto	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2 PENJELASAN ATAS LAPORAN OPERASIONAL

Laporan operasional memuat hal-hal yang berhubungan dengan aktivitas keuangan selama satu tahun. Laporan operasional menyajikan pos-pos Pendapatan-LO, Beban, Kegiatan Non Operasional, Pos Luar Biasa.

3.2.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO adalah hak pemerintah Kabupaten Brebes yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah, dengan realisasi dalam TA 2021 dan 2020.

Pendapatan-LO tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan-LO				
1. Pendapatan Asli Daerah – LO		481.339,00	(481.339,00)	-100%
2. Pendapatan Transfer – LO				
3. Lain-lain Pendapatan yang Sah – LO				
Jumlah	-	481.339,00	(481.339,00)	-100,00%

1. Pendapatan Asli Daerah – LO

Pendapatan Asli Daerah – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp. 0 dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Asli Daerah-LO				
a. Pendapatan Pajak Daerah – LO	-	-	-	-
b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO	-	481.339,00	(481.339,00)	-100%
c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO	-	-	-	-
d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO	-	-	-	-
Jumlah	-	481.339,00	(481.339,00)	100,00%

2. Pendapatan Transfer - LO

Pendapatan Transfer – LO tahun 2021 adalah sebesar RpNIHIL dengan rincian sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Transfer – LO				
a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO				
b. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya – LO				
c. Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya – LO				
d. Bantuan Keuangan – LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LO tahun 2021 adalah sebesar Rp sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Lain-lain Pendapatan Yang Sah - LO				
a. Pendapatan Hibah – LO				
b. Dana Darurat – LO				
c. Pendapatan Lainnya – LO				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Rincian Pendapatan Hibah – LO :

Pendapatan hibah – LO dirinci sesuai tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Hibah – LO				
a. Pendapatan Hibah BEC				
b. Penerimaan Pabrik Gula				
c. Pendapatan Hibah Barang				
d. Dst.....				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Rincian Dana Darurat

Dana Darurat tahun 2021 sebesar NIHIL

c. Rincian Pendapatan Lainnya - LO

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Pendapatan Lainnya – LO				

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
a. Bantuan Keuangan Untuk Pembangunan				
b. Dispensasi Kelebihan Muatan				
c. Bantuan dari Pihak ke-3				
d. Tera Ulang				
e. Ijin Usaha Perkebunan				
f. Ijin Usaha Perikanan				
g. Bantuan Retribusi SP3 Kayu				
h. Pendapatan Dana BOS				
i. Dst....				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3.2.2 Beban

Beban dari Kegiatan Operasional adalah sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban				
a. Beban Operasi	2.732.963.250,00	2.697.103.752,00	35.859.498,00	1,33%
b. Beban Transfer				
Jumlah	2.732.963.250,00	2.697.103.752,00	35.859.498,00	1,33%

1. Rincian Beban Operasi sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
BEBAN OPERASI				
a. Beban Pegawai	2.187.995.472,00	1.838.440.872,00	349.554.600,00	19,01%
b. Beban Persediaan	141.031.160,00	279.908.510,00	(138.877.350,00)	-49,62%
c. Beban Jasa	216.947.016,00	344.185.521,00	(127.238.505,00)	-36,97%
d. Beban Pemeliharaan	26.535.000,00	1.550.000,00	24.985.000,00	1611,94%
e. Beban Perjalanan Dinas	47.436.618,00	106.184.265,00	(58.747.647,00)	-55,33%
f. Beban Bunga				
g. Beban Subsidi				
h. Beban Hibah				
i. Beban Bantuan Sosial				
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	113.017.984,00	126.834.584,00	(13.816.600,00)	-10,89%
k. Beban Penyisihan Piutang				
l. Beban Lain-lain				
Jumlah	2.732.963.250,00	2.697.103.752,00	35.859.498,00	1,33%

- a. Beban operasi tersebut termasuk di dalamnya beban yang berasal dari Belanja BLUD. Atas belanja BLUD tersebut telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BLUD :	Realisasi 2021 (Rp)
BEBAN OPERASI	
a. Beban Pegawai	
b. Beban Persediaan	
c. Beban Jasa	
d. Beban Pemeliharaan	
e. Beban Perjalanan Dinas	
f. Beban Bunga	
g. Beban Subsidi	
h. Beban Hibah	
i. Beban Bantuan Sosial	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
k. Beban Penyisihan Piutang	
l. Beban Lain-lain	
Jumlah	NIHIL

- b. Atas belanja BOS tersebut juga telah dilakukan mapping ke masing-masing rincian beban sebagai berikut :

Mapping Beban BOS	Realisasi 2021 (Rp)
BEBAN OPERASI	
a. Beban Pegawai	
b. Beban Persediaan	
c. Beban Jasa	
d. Beban Pemeliharaan	
e. Beban Perjalanan Dinas	
f. Beban Bunga	
g. Beban Subsidi	
h. Beban Hibah	
i. Beban Bantuan Sosial	
j. Beban Penyusutan dan Amortisasi	
k. Beban Penyisihan Piutang	
l. Beban Lain-lain	
Jumlah	NIHIL

- c. Beban Hibah

Realisasi Beban Hibah TA 2021 sebesar RpNIHIL , merupakan Beban Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi Swasta termasuk di dalamnya Beban Barang-barang yang diserahkan kepada pihak ketiga/masyarakat. Beban hibah yang dicatat adalah sesuai nilai barang yang diserahkan sebesar RpNIHIL. Rekap Mutasi Barang yang dihibahkan kepada pihak ke-3 sebagai berikut :

[illegible]

d. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban penyusutan aset tetap tahun 2021 adalah sebesar Rp dengan rincian sebagai berikut :

- a. Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin Rp
- b. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan Rp
- c. Beban Penyusutan Jalan, Irigasi dan Jaringan Rp
- d. Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya Rp

Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud tahun 2021 berupa amortisasi software sebesar Rp..... Rincian Beban Amortisasi dan Akumulasi Amortisasi tahun 2021 sebagai berikut :

Nama Software	Umur s.d 2021	Nilai Software (Rp)	Amortisasi per tahun (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2020 (Rp)	Beban Amortisasi 2021 (Rp)	Akumulasi Amortisasi 2021 (Rp)
Jumlah						

e. Beban Penyisihan Piutang

Beban Penyisihan Piutang tahun 2021 sebesar RpNIHIL, terdiri dari :

Beban Penyisihan Piutang :	Nilai (Rp)
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan	
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat	
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah	
Beban Penyisihan Piutang Lainnya	
Jumlah	NIHIL

2. Rincian Beban Transfer disampaikan sebagaimana tabel berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		

a. Beban Bagi Hasil				
b. Beban Bantuan Keuangan				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

a. Beban Bagi Hasil

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Bagi Hasil				
a. Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa				
b. Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

b. Beban Bantuan Keuangan

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
Beban Bantuan Keuangan				
a. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi				
b. Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota				
c. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota				
d. Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi				
e. Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa				
f. Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota				
g. Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik				
Jumlah	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

3. Beban Tak Terduga tahun 2021 sebesar Rp , adapun rincian penggunaan beban tak terduga adalah :
- Penggunaan untuk penanganan Covid-19 sebesar Rp
 - Penggunaan untuk darurat bencana sebesar Rp
 - Penggunaan untuk pengembalian pendapatan tahun sebelumnya sebesar Rp
- Penggunaan secara rinci telah disampaikan pada penjelasan Belanja Tak Terduga.

3.2.3 Kegiatan Non Operasional

Rincian Kegiatan Non Operasional sebagai berikut :

Uraian	Realisasi		Kenaikan /(Penurunan)	%
	Tahun 2021	Tahun 2020		
SURPLUS NON OPERASIONAL – LO				
Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO				
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
JUMLAH				
DEFISIT NON OPERASIONAL				
Defisit Penjualan/ Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO				
Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO				
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO				
JUMLAH				
SURPLUS DEFISIT KEGIATAN NON OPERASIONAL – LO				

1. Surplus Non Operasional

Secara rinci dijelaskan dalam tabel berikut :

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO	
1	Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
2	Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang- LO	
4	Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO	
	Jumlah	-
	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO	
5	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO	
	Jumlah	-
	Total	-

Penjelasan :

a. Surplus Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2021 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp .Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada SKPDataas penjualan tersebut sebesar Rp0,00 (hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah). Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL

c. Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar NIHIL

2. Defisit Non Operasional

No	Uraian	Jumlah (Rp)
	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar – LO	
1	Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO	
2	Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO	
3	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO	
	Jumlah	-
	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO	
1	Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO	
2	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO	
3	Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO	
4	Defisit Penyelesaian Obligasi-LO	
5	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi – LO	
6	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota – LO	
	Jumlah	-
	Total	-

Penjelasan :

a. Defisit Penjualan Aset Non Lancar-LO

Pada tahun 2020 dilaksanakan penjualan aset tetap dengan nilai perolehan sebesar Rp .Barang-barang tersebut telah dijual dengan nilai buku Rp (nilai perolehan – nilai penyusutan). Penerimaan kas pada OPD atas penjualan tersebut sebesar Rp 0,00 karena hasil penjualan langsung disetor ke Kas Daerah. Selisih atas nilai jual terhadap nilai buku dicatat sebagai Defisit Penjualan Aset Non Lancar – LO sebesar Rp.

b. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO sebesar NIHIL

c. Defisit Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar NIHIL

3.2.4. Pos Luar Biasa

Pendapatan dari Pos Luar Biasa sebesar NIHILdan Beban dari Pos Luar Biasa sebesar NIHIL.

3.3 PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas TA 2021 dibandingkan dengan TA 2020.

Ekuitas per 31 Desember 2021 sebesar **Rp. 1.713.806.264** berasal dari saldo awal Ekuitas per 31 Desember 2020 sebesar **Rp. 1.759.832.330**, ditambah Surplus-LO TA 2021 sebesar **minus Rp. 2.732.963.250** ditambah Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar **Rp 0**, dan Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan sebesar **Rp. 2.586.157.027..**

Rincian Dampak Kumulatif Perubahan/Kebijakan/Kesalahan Mendasar sebagai berikut :

Uraian	2021(Rp)	2020(Rp)
Koreksi Nilai Persediaan		
Selisih Revaluasi Aset Tetap		-
Koreksi Ekuitas Lainnya	13.597.851	70.000.000
Jumlah	13.597.851	70.000.000

Koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp. 13.597.851 merupakan selisih dari penambahan dan pengurangan koreksi ekuitas lainnya (Rp. 12.037.850 + 1.560.001) sesuai jurnal penyesuaian dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Penambahan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi masuk antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR+MM	
Koreksi saldo awal (inventarisasi barang belum tercatat/berlebih) - KOR+LBH	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah masuk tahun-tahun sebelumnya) - KOR+HBM	
Koreksi saldo awal Aset tetap (atribusi nilai sertifikat tanah tahun-tahun sebelumnya) - KOR+SER	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hilang pencatatan) - KOR+HCTT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi) - KOR+/-TKAP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi) - KOR+NKAP	
Koreksi saldo awal (pencatatan penilaian barang hasil inventarisasi) - KOR+NILAI	
Koreksi saldo awal tambah (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Pencatatan mutasi masuk aset tetap dari OPD - MM	
Penyesuaian akumulasi penyusutan penghapusan aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi keluar aset tetap	
Mutasi Masuk Barang Rusak Berat antar SKPD	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Piutang	
Pencatatan Koreksi Saldo Awal Penyisihan Piutang	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang TGR karena setoran atau pengurangan nilai piutang TGR	

Uraian	2021(Rp)
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang Retribusi	
Pencatatan Pengurangan Penyisihan Piutang BLUD	
Koreksi saldo awal Utang Jangka Pendek Lainnya karena	13. 597.851
Mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
Reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
Koreksi saldo awal kas	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir Dinas Koperasi, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di Dinas Koperasi	
Pengembalian piutang POKOK ex-Dana Bergulir kepada masyarakat, penerimaan kas di PPKD piutang dicatat di SKPD pengelola (non Dinas Koperasi)	
Penyesuaian penyisihan piutang atas penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
Koreksi Saldo Awal Utang Lebih Bayar DBH Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pusat	
Pengurangan Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
Pengurangan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
Jumlah	13.597.851

2. Pengurangan Koreksi Ekuitas Lainnya

Uraian	2021(Rp)
Serah Terima Kas Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Piutang/Beban Dibayar Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Persediaan Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Tetap Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Aset Lainnya Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Serah Terima Kewajiban/Utang/Pendapatan Diterima Dimuka Antar Entitas Akuntansi yang Terdampak Perubahan SOTK	
Koreksi saldo awal Aset tetap (penghapusan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HPS	
Koreksi saldo awal Aset tetap (mutasi keluar antar SKPD tahun-tahun sebelumnya) - KOR-MUT	
Koreksi saldo awal Aset tetap (perubahan batas nilai kapitalisasi) - KOR-NKAP	
Koreksi saldo awal kurang (pemeliharaan tahun-tahun sebelumnya) - KOR-PEMEL	
Koreksi saldo awal Aset tetap (dobel pencatatan) - KOR-DOB	
Koreksi saldo awal Aset tetap (seharusnya merupakan barang habis pakai tahun-tahun sebelumnya) - KOR-BHP	
Koreksi saldo awal Aset tetap (hibah keluar tahun-tahun sebelumnya) - KOR-HB	
Koreksi saldo awal kurang (reklasifikasi aset tetap penyesuaian kode permendagri 108)	
Koreksi saldo awal kurang (pengurangan nilai KDP)	
Reklasifikasi aset tetap ke Ekstracomptable (E)	
Pencatatan mutasi keluar aset tetap ke OPD – MUT	
Penghapusan barang Baik (B)/Rusak Ringan (RR) – HPS	
Koreksi saldo akumulasi penyusutan awal Aset tetap	
Penyesuaian akumulasi penyusutan mutasi masuk aset tetap	
Koreksi saldo awal aset lainnya barang Rusak Berat (RB)/Tidak Ditemukan (TD) karena	
Koreksi saldo awal Akumulasi Penyusutan Barang RB/TD	
Koreksi saldo awal Akumulasi Amortisasi ATB	
Mutasi Keluar Barang Rusak Berat antar SKPD	
Penghapusan Aset Lain-Lain - Aset Tidak Berwujud Software	
Pengembalian pokok ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	

Uraian	2021(Rp)
Koreksi saldo awal utang belanja karena	
Mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
Reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Koreksi saldo awal beban dibayar di muka	
Penyesuaian saldo awal Pendapatan diterima di muka	
Jumlah	

3.4PENJELASAN POS-POS NERACA

3.4.1 ASET

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
ASET		
1. Aset Lancar	1.043.400,00	3.681.200,00
2. Aset Tetap	1.773.468.600,00	1.884.926.583,00
3. Aset Lainnya	658.600,00	658.600,00
Jumlah Aset	1.775.170.600,00	1.889.266.383,00
KEWAJIBAN & EKUITAS		
1. Kewajiban	61.364.336,00	42.251.747,00
2. Ekuitas	1.713.806.264,00	1.847.014.636,00
Jumlah Kewajiban Dan Ekuitas	1.775.170.600,00	1.889.266.383,00

1. Aset Lancar

Aset lancar merupakan kelompok pos/rekening yang menggambarkan kekayaan daerah yang dicairkan atau memiliki perputaran paling lama satu tahun dihitung sejak tanggal neraca. Saldo keseluruhan kelompok akun aset lancar per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 dapat dirinci sebagai berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Kas		
Piutang		
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih		
Persediaan	1.043.400,00	3.681.200
Beban Dibayar Dimuka		
Jumlah Aset Lancar	1.043.400,00	3.681.200,00

A. KAS

Saldo kas terdiri atas Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di JKN dan Kas Lainnya dengan rincian sesuai tabel berikut:

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
KAS		
Kas di Kas Daerah		
Kas di Bendahara Penerimaan		
Kas di Bendahara Pengeluaran		
Kas di BLUD		
Kas Dana BOS		
Kas Dana Kapitasi pada FKTP		
Kas Lainnya		
Setara Kas		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Saldo Kas per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp dan Saldo Kas tahun 2021 sebesar Rp terdiri atas :

- 1) Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan uang tunai/kas di rekening giro yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Pengeluaran pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) sebesar Rp. Kas tersebut merupakan :
 - a) ...
 - b) ...
- 2) Kas di Bendahara Penerimaan merupakan saldo kas yang masih berada dalam penguasaan Bendahara Penerimaan pada Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) sebesar Rp , Kas tersebut merupakan :
 - a) ...
 - b) ...
- 3) Kas BLUD Kas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) merupakan kas dan setara kas yang digunakan untuk pengelolaan penerimaan pendapatan dan biaya yang berasal dari hasil operasional BLUD, sebesar Rp

Rinci Kas di BLUD Puskesmas adalah sebagai berikut :

- BLUD Puskesmas	Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas	Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas	Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas	Puskesmas	: Rp
- BLUD Puskesmas	Puskesmas	: Rp
Jumlah		Rp

- 4) Kas di Bendahara BOS merupakan Kas BOS sebesar Rp merupakan Dana BOS yang berada pada masing-masing sekolah di lingkungan Kabupaten Brebes. Dengan rincian sebagai berikut :
 - SD : Rp pada SD Negeri
 - SMP : Rp pada SMP Negeri
- 5) Kas Lainnya, merupakan Kas

B. PIUTANG

Saldo piutang per 31 Desember 2021 sebesar Rp NIHIL dengan rincian dijelaskan sesuai lampiran :

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pendapatan :		
Piutang Pajak Daerah		
Piutang Retribusi Daerah		
Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Lainnya :		
Piutang Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

1) Piutang Pendapatan

a) Piutang Pajak Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan pajak daerah, sesuai dengan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima, Saldo Piutang Pajak Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Pajak :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Pajak Hotel		
Piutang Pajak Restoran		
Piutang Pajak Hiburan		
Piutang Pajak Reklame		
Piutang Pajak Penerangan Jalan		
Piutang Pajak Parkir		
Piutang Pajak Air Tanah		
Piutang Pajak Sarang Burung Walet		
Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan		
Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)		
Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		
Piutang Pajak Lingkungan		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Pajak	

Uraian	Nilai (Rp)
Penambahan :	
a. Penambahan piutang atas transaksi tahun 2021	
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	
c. Dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	
c..... dst	
Saldo Akhir Piutang Pajak	

Rincian Mutasi Piutang Pajak dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2021		
a. Piutang pajak		
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		
a. Piutang pajak		(contoh: koreksi kurang catat)
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang pajak		
b. Piutang pajak		
c. Piutang pajak		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang pajak		(contoh: koreksi lebih catat)
b. Piutang pajak		(contoh: koreksi pembatalan SKPD/kesalahan SKPD)
c. Piutang pajak		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

b) Piutang Retribusi Daerah

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima, Saldo Rekening Piutang Retribusi Daerah sebesar Rp dengan rincian sesuai tabel berikut :

Piutang Retribusi Daerah :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Retribusi Jasa Umum		
Piutang Retribusi Jasa Usaha		
Piutang Retribusi Perizinan Tertentu		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo awal Piutang Retribusi	
Penambahan :	
a. Penambahan piutang atas transaksi tahun 2021	
b. Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu	
c. Dst	
Pengurangan :	
a. Setoran piutang tahun berjalan	
b. Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu	
c. dst	
Saldo Akhir Piutang Retribusi	NIHIL

Rincian Mutasi Piutang Retribusi dijelaskan sebagai berikut :

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Penambahan piutang transaksi 2021		
a. Piutang retribusi		
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi tambah/salah catat saldo piutang tahun lalu		

Uraian Penambahan :	Nilai (Rp)	Keterangan
a. Piutang retribusi		(contoh: koreksi kurang catat)
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Setoran piutang tahun berjalan		
a. Piutang retribusi		
b. Piutang retribusi		
c. Piutang retribusi		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Uraian Pengurangan :	Nilai (Rp)	Keterangan
Koreksi kurang/salah catat saldo tahun lalu		
a. Piutang retribusi		(contoh: koreksi lebih catat)
b. Piutang retribusi		(contoh: koreksi pembatalan SKPD/kesalahan SKPD)
c. Piutang retribusi		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

c) Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah selain dari pajak dan retribusi daerah, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum diterima. Saldo piutang dimaksud adalah Rp . Rincian Piutang tersebut dijelaskan sebagai berikut :

1. Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMN		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD		
Piutang Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada Perusahaan Swasta		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

2. Piutang Piutang Lain-lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2021	Th. 2020
--------------------------------	----------	----------

Piutang Lain-lain PAD yang Sah	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Selisih Lebih Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Hasil Kerja Sama Daerah		
Piutang Jasa Giro		
Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Bunga		
Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah		
Piutang Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain		
Piutang Penerimaan Keuntungan dari Selisih Nilai Tukar Rupiah Terhadap Mata Uang Asing		
Piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan		
Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah		
Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah		
Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan		
Piutang Pendapatan dari Pengembalian		
Piutang Pendapatan BLUD		
Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan		
Piutang Pendapatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP)		
Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir		
Piutang Pendapatan Berdasarkan Putusan Pengadilan (Inkracht)		
Piutang Pendapatan Denda atas Pelanggaran Peraturan Daerah		
Piutang Pendapatan Zakat, Infaq, Shadaqah, dan Wakaf		
Piutang dari Angsuran/Cicilan Penjualan		
Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah		
Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum		
Piutang Lain-lain PAD Yang Sah Lainnya		
Jumlah	NIHIL	NIHIL

Penjelasan :

- a. Piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang pokok dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp
- b. Piutang Penerimaan atas Tuntutan Ganti Kerugian Keuangan Daerah merupakan piutang atas kehilangan barang milik daerah berupasesuai SKTJM/SK pembebanan a.n sebesar Rp..... Pengurangan dari saldo 2020 merupakan setoran dan penambahan saldo 2021 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.

- c. Piutang Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan merupakan piutang denda atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan fisik oleh penyedia jasa dan belum diterima sampai dengan akhir periode akuntansi. Daftar Piutang Keterlambatan Pekerjaan sebagai berikut :

No	Uraian Pekerjaan	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1			
2			
3			
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- d. Piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah sebesar Rp merupakan piutang kepada wajib pajak atas denda keterlambatan pembayaran pajak. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Pajak	Nilai (Rp)
1	Pajak		
2	Pajak		
3	Pajak		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- e. Piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang kepada wajib retribusi atas denda keterlambatan pembayaran retribusi. Rinciannya dijelaskan pada tabel berikut :

No	Uraian	Tahun Retribusi	Nilai (Rp)
1	Retribusi		
2	Retribusi		
3	Retribusi		
	Jumlah	NIHIL	NIHIL

- f. Piutang Pendapatan Hasil Eksekusi atas Jaminan sebesar Rp..... merupakan Piutang Jaminan atas pekerjaan tahun pekerjaan oleh penyedia jasa a.n
- g. Piutang Pendapatan dari Pengembalian sebesar Rp merupakan piutang atas kelebihan pembayaran belanja kepada yang belum dikembalikan kepada Pemkab Brebes.
- h. Piutang Pendapatan BLUD
Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas penerimaan pendapatan daerah dari aktivitas Badan Layanan Umum Daerah (BLUD), yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2021 belum

diterima. Saldo piutang dimaksud per tanggal tersebut adalah Rp..... Rincian Piutang BLUD adalah sebagai berikut :

Uraian	2021	2020
1. BLUD		
Piutang BPJS		
Piutang		
Piutang		
Jumlah 1		
2. BLUD		
Piutang BPJS		
Piutang		
Piutang		
Jumlah 2		
Total		

(uraian/nama BLUD boleh ditambah)

- i. Piutang Pendapatan Denda Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan sebesar Rp merupakan piutang kepada atas keterlambatan pembayaran pemanfaatan BMD
- j. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- k. Piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir merupakan piutang jasa dana bergulir yang dikelola SKPD berupa pinjaman modal dana/peralatan mesin kepada pihak ke-3 tahun sebesar Rp.....
- l. Piutang Hasil dari Pemanfaatan Kekayaan Daerah sebesar Rp..... merupakan piutang pemanfaatan BMD yang belum diterima pembayarannya per 31 Desember 2022. Rinciannya dijelaskan sesuai tabel berikut :

No	Uraian	Nama Pihak Ke-3	Nilai (Rp)
1	Piutang pemanfaatan tanah		
2	Piutang pemanfaatan bangunan		
3	Dst ...		
	Jumlah		

d) Piutang Transfer

Piutang Transfer sebesar Rp dirinci sebagai berikut :

Piutang Transfer :	Th. 2021	Th. 2020
--------------------	----------	----------

Piutang Transfer :	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Transfer Antar Daerah		
Jumlah		

Rincian Piutang Transfer dijelaskan sesuai tabel berikut :

1. Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Piutang Dana Perimbangan		
Piutang Dana Insentif Daerah (DID)		
Piutang Dana Otonomi Khusus dan Tambahan Infrastruktur		
Piutang Dana Keistimewaan		
Piutang Dana Desa		
Piutang Transfer Dana Penyesuaian		
Piutang Transfer Lainnya		
Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah		

2. Piutang Transfer Pemerintah Antar Daerah

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Transfer Antar Daerah		
Piutang Bagi Hasil		
Piutang Bantuan Keuangan		
Piutang Pendapatan Hibah		
Piutang Sumbangan Pihak Ketiga/Sejenis		
Piutang Dana Darurat pada Tahap Pasca Bencana		
Piutang Pendapatan Hibah Dana BOS		
Piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah		
Jumlah		

Penjelasan :

- a. Piutang Bagi Hasil sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang
 - 2) Piutang
 - 3) Piutang
- b. Piutang Bantuan Keuangan sebesar Rp dengan rincian :
 - 1) Piutang
 - 2) Piutang
 - 3) Piutang

4) Piutang Lainnya

Rincian Piutang Lainnya dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Piutang Lainnya		
Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Pinjaman Jangka Panjang		
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Uang Muka		
Jumlah		

Penjelasan :

- Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang sebesar NIHIL
- Bagian Lancar Pinjaman Jangka Panjang sebesar NIHIL
- Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran sebesar NIHIL
- Bagian Lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp

Rekening ini menggambarkan hak Pemerintah Daerah atas Putang TP-TGR yang akan diterima dalam waktu 12 (duabelas) bulan kedepan. Bagian Lancar ini merupakan Piutang Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Kerugian yang telah ditetapkan dengan SKTJM atau Keputusan Pembebanan. Rincian Bagian Lancar TP-TGR dijelaskan sesuai tabel berikut :

Nama Bendahara/Pihak Yang Merugikan	Th. 2021	Th. 2020
Jumlah		

Pengurangan dari saldo 2020 merupakan setoran dan penambahan saldo 2021 merupakan penetapan kerugian daerah baru a.n dengan SKTJM.

- Uang Muka sebesar NIHIL

C. PENYISIHAN PIUTANG TIDAK TERTAGIH

Penyisihan Piutang Tidak Tertagih dirinci sesuai penjelasan berikut :

- Penyisihan Piutang Pendapatan

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
---------------	----------	----------

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Pendapatan		
Penyisihan Piutang Pajak Daerah		
Penyisihan Piutang Retribusi		
Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan		
Penyisihan Piutang Lain-lain PAD yang Sah		
Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah		
Penyisihan Piutang Pendapatan Lainnya		
Jumlah		

2) Penyisihan Piutang Lainnya

Jenis Piutang	Th. 2021	Th. 2020
Penyisihan Piutang Lainnya		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Pemerintah Pusat		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Daerah Lain		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Jangka Panjang dari Lembaga Keuangan Bukan Bank		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Pinjaman melalui BLUD		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Penyisihan Piutang Lainnya-Bagian lancar Tuntutan Ganti Kerugian Daerah		
Penyisihan Piutang Lainnya-Uang Muka		
Penyisihan Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran		
Jumlah	-	-

D. BEBAN DIBAYAR DI MUKA

Rekening ini merupakan biaya yang belum merupakan kewajiban Pemkab Brebes untuk membayarnya pada periode yang bersangkutan, namun sudah dibayarkan terlebih dahulu dan barang/jasa atas pengeluaran tersebut tidak langsung diterima saat itu juga. Saldo sebesar Rp dengan rincian dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Th. 2021	Th. 2020
Jumlah		

Penjelasan :

- 1) Beban Dibayar Dimuka sebesar Rp dibayar tanggal dengan jangka waktu bulan/tahun. Saldo yang telah menjadi beban sebesar Rp dan saldo yang merupakan beban dibayar di muka sebesar Rp
- 2) Dst

E. PERSEDIAAN

Rekeningini menggambarkan harga perolehan persediaan barang pakai habis yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah, dan barang-barang untuk dijual/diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat, dengan rincian saldo per 31 Desember 2021 sebagai berikut :

Persediaan :	Th. 2021	Th. 2020
Bahan	-	-
Suku Cadang	-	-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.043.400,00	1.181.200,00
Obat-obatan	-	2.500.000,00
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan	-	-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga	-	-
Natura dan Pakan	-	-
Persediaan Penelitian	-	-
Persediaan Dalam Proses	-	-
Persediaan Barang BOS	-	-
Jumlah	1.043.400,00	3.681.200,00

Penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan :	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan		3.210.000,00	3.210.000,00	-
Suku Cadang		-		-
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	1.181.200	56.373.360,00	56.511.160,00	1.043.400,00
Obat-obatan	2.500.000		2.500.000,00	-
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				-
Persediaan Utk Tujuan Strategis/Bergaja-jaga				-
Natura dan Pakan		78.810.000,00	78.810.000,00	-
Persediaan Penelitian				-
Persediaan Dalam Proses				-
Persediaan Barang BOS				-
Jumlah	3.681.200,00	138.393.360,00	141.031.160,00	1.043.400,00

Mutasi penambahan dan pengurangan selama tahun 2021 secara rinci dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
SALDO AWAL	3.681.200,00
Koreksi (+) Saldo Awal	
Pengadaan / Pembelian	138.393.360,00
Reklas Dari Belanja Tdk Terduga	
Reklas Dari B. Modal	
Reklas Dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Reklas Dari B. Pegawai	
Reklas Dari B. Jasa	
Reklas Dari Pemeliharaan	
Mutasi / Transfer Masuk	
Hibah Masuk	
Hutang Persediaan	
Reklas Antar Beban Persediaan (+)	-
Jumlah Penambahan	138.393.360,00
Koreksi (-) Saldo Awal	
Pemakaian	141.031.160,00
Mutasi Keluar	
Hibah Keluar	
Reklas Ke Aset Tetap	
Reklas Ke Ekstrakomtabel	
Reklas Ke Belanja Pegawai	
Reklas Ke Belanja Jasa	
Reklas Ke Belanja Pemeliharaan	
Pindah Ke Kadaluarsa/-Rusak	
Reklas Antar Beban Persediaan (-)	-
Jumlah Pengurangan	141.031.160,00
SALDO AKHIR PERSEDIAAN	1.043.400,00

Saldo persediaan tidak termasuk di dalamnya persediaan yang telah kadaluarsa dan rusak. Mutasi barang kadaluarsa dan rusak selama tahun 2021 dapat dijelaskan pada tabel berikut :

Persediaan Kadaluarsa/Usang/Rusak	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Bahan				
Suku Cadang				
Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor				
Obat-obatan				
Persediaan Untuk Dijual/Diserahkan				
Persediaan Utk Tujuan Strategis/ Bergaja-jaga				
Natura dan Pakan				
Persediaan Penelitian				
Persediaan Dalam Proses				
JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Penambahan sebesar Rp terdiri dari :

- a. Barang persediaan yang semula merupakan barang aktif namun pada tahun 2021 telah dinyatakan kadaluarsa/using/rusak disahkan dengan berita acara nomor sebesar Rp.
- b. Penambahan barang kadaluarsa/using/rusak karena koreksi pencatatan sebesar Rp.

Pengurangan sebesar Rp terdiri dari :

- a. Penghapusan barang kadaluarsa/using/rusak sebesar Rp
- b. Pengurangan karena koreksi pencatatan sebesar Rp

F. INVESTASI JANGKA PANJANG

Terdiri dari :

- a. Investasi Jangka Panjang Non Permanen
Saldo Investasi Jangka Panjang Non Permanen sebesar NIHIL
- b. Investasi Jangka Panjang Permanen
Investasi Jangka Panjang Permanen sebesar Rp merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah (PMPD) kepada perusahaan daerah. Nilai ini berasal dari penambahan nilai penyertaan modal selama tahun 2021 dengan perhitungan metode ekuitas dan metode biaya.
Saldo PMPD masing-masing perusahaan daerah adalah sebagai berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :		
1	BPD Bank Jateng		
2	BKK Jateng		
3	PD. BPR BKK Banjarharjo		
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)		
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :		
1	PDAM Tirta Baribis		
2	Perusda Perbengkelen		
3	Perusda Percetakan		
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan		
5	PRPP Jawa Tengah – Semarang		
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL

Pengeluaran pembiayaan untuk penyertaan modal tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Modal Saham Pekab Brebes Th. 2020	Penyertaan Modal 2021	Modal Saham Pekab Brebes Th. 2021
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :			
1	BPD Bank Jateng			
2	BKK Jateng			
3	PD. BPR BKK Banjarharjo			
4	PD BPR Bank Brebes (Bank Puskpakencana)			
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :			
1	PDAM Tirta Baribis			
2	Perusda Perbengkelen			

3	Perusda Percetakan			
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan			
5	PRPP Jawa Tengah - Semarang			
	JUMLAH	NIHIL	NIHIL	NIHIL

Investasi Jangka Panjang Permanen sesuai metode pencatatannya dijelaskan sebagai berikut :

1) Metode Ekuitas

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD th. 2020	Total Ekuitas	% Kepemilikan Daerah	Saldo PMPD th 2021
	PMPD PADA LEMBAGA KEUANGAN - BANK :				
1	PD. BPR BKK Banjarharjo				
2	PD BPR Bank Brebes (Bank Puspkencana)				
	PMPD PADA PERUSAHAAN DAERAH :				
1	PDAM Tirta Baribis				
2	Perusda Perbengkelan				
3	Perusda Percetakan				
4	Perusda Farmasi Dan Sarana Kesehatan				
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

2) Metode Biaya

Perhitungannya dijelaskan pada tabel berikut :

No.	Perusahaan Daerah	Saldo PMPD Th. 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo PMPD Th. 2021
1	BPD Bank Jateng				
2	BKK Jateng				
3	PRPP Jawa Tengah - Semarang				
	J u m l a h	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

G. ASET TETAP DAN AKUMULASI PENYUSUTAN

1. Aset Tetap

Akun ini menunjukkan jumlah kekayaan milik Pemerintah Kabupaten Brebes berupa aset tetap dengan usia manfaat lebih dari satu tahun. Aset tetap dimanfaatkan untuk kegiatan pemerintahan dan pelayanan publik.

Rekening ini menggambarkan nilai perolehan aset tetap yang digunakan oleh Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020. Perolehan aset tetap berasal dari kapitalisasi Belanja Modal dan/atau belanja lainnya yang didalamnya termasuk pengadaan aset tetap dalam tahun anggaran berkenaan dan/atau perolehan lainnya yang sah. Belanja yang tidak dikapitalisasi berdasarkan kebijakan akuntansi adalah Belanja Perjalanan Dinas, Belanja ATK, penggandaan dan sejenisnya.

Saldo aset tetap Pemerintah Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 1.773.468.600 dan Rp. 1.884.926.583 dengan rincian sebagai berikut :

Aset Tetap :	Th. 2021	Th. 2020
a. Tanah	407.690.000,00	407.690.000,00
b. Peralatan dan Mesin	999.265.288,00	999.265.288,00
c. Gedung dan Bangunan	1.434.675.500,00	1.434.675.500,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan		
e. Aset Tetap Lainnya	266.000,00	266.000,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan		
g. Akumulasi Penyusutan	(1.068.428.188,00)	(956.970.205,00)
Jumlah Aset Tetap	1.773.468.600,00	1.884.926.583,00

Mutasi aset tetap tahun 2021 sebagai berikut :

URAIAN JENIS	SALDO 2020	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO 2021
a. Tanah	407.690.000,00	-	-	407.690.000,00
b. Peralatan dan Mesin	999.265.288,00	-	-	999.265.288,00
c. Gedung dan Bangunan	1.434.675.500,00	-	-	1.434.675.500,00
d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan	-	-	-	-
e. Aset Tetap Lainnya	266.000,00	-	-	266.000,00
f. Konstruksi dalam Pekerjaan	-	-	-	-
JUMLAH	2.841.896.788,00	-	-	2.841.896.788,00

1) Rincian mutasi penambahan aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Penambahan :	
1	Belanja Modal	
2	Reklas Dari B. Pegawai	
3	Reklas Dari B. Jasa	
4	Reklas Dari B. Persediaan	
5	Reklas Dari B. Pemeliharaan	
6	Reklas Dari Persediaan Barang Yang Diserahkan Kepada Pihak Ke-3	
7	Hibah Masuk (Pemerintah Pusat)	
8	Hibah Masuk (Pemerintah Provinsi)	
9	Hibah Masuk (Pihak Ke-3)	
10	Hibah Masuk (Komite Sekolah)	
11	Mutasi Masuk	
12	Hutang Aset	
13	Reklas Dari Aset Lainnya (Rusak Berat)	
14	Reklas Dari Aset Lainnya (Detail Engineering)	

NO	URAIAN	JUMLAH
15	Reklas Aset Tetap Dari KDP	
16	Koreksi Tambah (Mutasi Masuk Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Tambah (Inventarisasi Barang Belum Tercatat/Berlebih)	
18	Koreksi Tambah (Hibah Masuk Tahun Sebelumnya)	
19	Koreksi Tambah (Atribusi Nilai Sertifikat Tanah Tahun Sebelumnya)	
20	Koreksi Tambah (Hilang Pencatatan)	
21	Koreksi Tambah (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
22	Koreksi Tambah (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
23	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
24	Koreksi Tambah (Penilaian Aset Tetap)	
25	Koreksi Tambah (Reklasifikasi Detail Engineering Ke Aset Tetapnya Tahun Sebelumnya)	
26	Koreksi Tambah (.....)	
	Jumlah Penambahan	NIHIL

Penjelasan :

- a) Hibah masuk dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp
- b) Hibah masuk dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp
- c) Hibah masuk dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp
- d) Hutang Aset berupa..... senilai Rp yang sampai dengan 31 Desember 2021 belum dibayar.
- e) Koreksi hibah masuk tahun sebelumnya berupa Hibah dari senilai Rp
- f) Koreksi tambah berupa senilai Rp
- g) Dst...

2) Rincian **mutasi pengurangan** aset tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
	Pengurangan :	
1	Extrakomtable	
2	Reklas Ke B. Persediaan	
3	Reklas Ke B. Pemeliharaan	
4	Reklas Ke B. Perjalanan Dinas	
5	Reklas Ke B. Pegawai	
6	Reklas Ke B. Jasa	
7	Belanja Modal Untuk Pembayaran Hutang	
8	Hibah Keluar	
9	Mutasi Keluar	
10	Reklas Dari KDP Ke Aset Tetap	
11	Rusak Berat (RB)	
12	Tidak Ditemukan (TD)	
13	Penghapusan Barang B/RR	
14	Reklas Ke Aset Tidak Berwujud (ATB)	
15	Koreksi Kurang (Penghapusan Tahun Sebelumnya)	
16	Koreksi Kurang (Mutasi Keluar Antar Opd Tahun Sebelumnya)	
17	Koreksi Kurang (Perubahan Batas Nilai Kapitalisasi)	
18	Koreksi Kurang (Perubahan Tabel Perhitungan Kapitalisasi)	
19	Koreksi Kurang (Reklasifikasi Antar Kode Aset Tetap)	
20	Koreksi Kurang (Pemeliharaan Tahun Sebelumnya)	
21	Koreksi Kurang (Dobel Pencatatan)	
22	Koreksi Kurang (BHP Tahun Sebelumnya)	
23	Koreksi Kurang (Hibah Keluar Tahun Sebelumnya)	

NO	URAIAN	JUMLAH
24	Koreksi Kurang (.....)	
	Jumlah Pengurangan	NIHIL

Penjelasan :

- a) Hibahkeluar dari Pemerintah Pusat berupa senilai Rp
- b) Hibah keluar dari Pemerintah Provinsi berupa senilai Rp
- c) Hibah keluar dari Pemerintah Pihak ke-3 berupa senilai Rp
- d) Koreksi hibah keluar tahun sebelumnya berupa Hibah dari
senilai Rp
- e) Koreksi kurang berupa senilai Rp
- f) Dst...

3) Konstruksi Dalam Pengerjaan

Saldo aset tetap Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp dan Rp. Adapun rincian Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP) per 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Nama Rekanan	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Kemajuan Fisik (%)	Nominal KDP (Rp)	Nominal Terhutang (Rp)
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
<i>Pekerjaan</i>						
Jumlah					-	-

Penjelasan :

- a) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp
- b) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp
- c) Pekerjaan tersebut bersumber dana dari dan dilaksanakan dengan jangka waktu pelaksanaan hari. Nilai kontrak sebesar Rp, nilai KDP tahun 2021 yang tercatat sebesar Rp, dan nilai terhutang sebesar Rp

Mutasi Penambahan/Pengurangan KDP tahun 2021 dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021	Ket
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Fisik telah selesai</i>
<i>Pekerjaan</i>					<i>(contoh) Penghapusan</i>

Pekerjaan					
Pekerjaan					
JUMLAH					

2. Akumulasi Penyusutan

Saldo akumulasi penyusutan aset tetap tahun 2021 tidak termasuk penyusutan atas aset tetap yang telah diusulkan penghapusannya dan telah dipindahbukukan ke kelompok Aset Lainnya akun Aset Lain-lain.

Mutasi Penambahan/Pengurangan Akumulasi Penyusutan Aset Tetap tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

URAIAN	SALDO AWAL	PENAMBAHAN	PENGURANGAN	SALDO AKHIR
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(29.029.285,00)	(4.225.858)	-	(33.255.143,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(163.984.254,00)	(35.714.286)	-	(199.698.540,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(256.250,00)	(256.250)	-	(512.500,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(263.500.904,00)	(19.510.104)	-	(283.011.008,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(28.968.100,00)	(1.668.000)	-	(30.636.100,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(500.000,00)	(500.000)	-	(1.000.000,00)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(208.354.450,00)	(23.532.500)	-	(231.886.950,00)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(262.376.962,00)	(26.050.985)	-	(288.427.947,00)
Jumlah	(956.970.205,00)	(111.457.983,00)	-	(1.068.428.188,00)

Penambahan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Beban Penyusutan	Hibah Masuk	Mutasi Masuk	Koreksi Tambah	Jumlah Penambahan
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	(4.225.857)	-	-	(1,00)	(4.225.858,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	(35.714.286)	-	-		(35.714.286,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	(256.250)	-	-		(256.250)
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(21.070.104)	-	-	1.560.000,00	(19.510.104,00)
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	(1.668.000)	-	-		(1.668.000)
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	(500.000)	-	-		(500.000)
Akumulasi Penyusutan Komputer	(23.532.500)	-	-		(23.532.500)
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	(26.050.987)	-	-	2,00	(26.050.985,00)
Jumlah	(113.017.984,00)	-	-	1.560.001,00	(111.457.983,00)

Pengurangan akumulasi penyusutan selama tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Penghapusan	Mutasi Keluar	Koreksi Kurang	Jumlah Pengurangan
Akumulasi Penyusutan Alat Besar	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Angkutan	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Pertanian	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Alat Laboratorium	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Komputer	-	-	-	-
Akumulasi Penyusutan Bangunan Gedung	-	-	-	-
Jumlah	-	-	-	-

H. DANA CADANGAN

Saldo Dana Cadangan Tahun 2021 sebesar NIHIL

I. ASET LAINNYA

Aset Lainnya per 31 Desember 2021 dan 31 Desember 2020 sebesar Rp. 658.600 dan Rp. 658.600 dengan rincian :

ASET LAINNYA	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Tagihan Jangka Panjang		
Kemitraan dengan Pihak Ketiga		
Aset Tidak Berwujud		
Aset Lain-lain	37.723.875,00	37.723.875,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud		
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(37.065.275,00)	(37.065.275,00)
Jumlah	658.600,00	658.600,00

1. Tagihan Jangka Panjang tahun 2021 sebesar Rp
2. Aset Tak Berwujud

Aset tersebut merupakan aset non keuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember tahun 2021 sebesar Rp .Saldo tersebut berupa software/aplikasi.

Penambahan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Pengadaan software/aplikasi tahun 2021 sebesar Rp
- b. Koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
- c. dst ...

Pengurangan Aset Tidak Berwujud sebagai berikut :

- a. Penghapusan software/aplikasi tahun 2021 sebesar Rp
- b. Koreksi pengurangan karena salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp
- c. dst ...

3. Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud

Saldo Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2021 sebesar Rp. Mutasi terdiri atas :

- a. Saldo awal Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp
- b. Beban Amortisasi Aset Tak Berwujud tahun 2021 sebesar Rp
- c. Koreksi penambahan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
- d. Koreksi pengurangan Amortisasi Aset Tidak Berwujud salah catat saldo tahun lalu sebesar Rp
- e. dst ...

4. Aset Lain-lain RP. 658.600 terdiri atas :

- a. Aset tetap Rusak Berat (RB)/TD saldo sebesar Rp. NIHIL
- b. Aset tetap yang telah tidak digunakan dalam operasional pemerintah saldo sebesar Rp. 37.723.875 .

Mutasi Aset Lain-lain dijelaskan pada tabel berikut :

Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Aset Tetap Rusak Berat/TD				
Aset Tetap yang Tidak Digunakan dalam Operasional Pemerintah				
Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat				
Jumlah				

- 1) Penambahan Barang RB/TD tahun 2021 sebesar Rp
- 2) Pengurangan barang RB/TD tahun 2021 sebesar Rp
 - a) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp . Atas barang-barang tersebut yang telah dihapus bukukan dan tidak tercatat pada KIB.
 - b) Pengurangan karena koreksi salah catat sebesar Rp .
- c. Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasional pemerintah :
 - 1) Detail Engineering (DE) yang tercatat pada Aset Lain-lain sebagai berikut :

Uraian Pekerjaan	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
DE				
DE				
DE				
DE				
Jumlah				

- a) Penambahan merupakan DE 2021 yang belum direalisasikan pekerjaan fisiknya sebesar Rp
- b) Pengurangan merupakan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap dan telah menambah nilai fisik yang berkenaan sebesar Rp
- c) Pengurangan saldo DE tahun sebelumnya yang telah direklasifikasi ke aset tetap lainnya buku sebesar Rp
- d) Pengurangan Saldo DE tahun sebelumnya yang dihapuskan karena batal digunakan Rp

2) Barang Hibah Keluar yang belum dihapuskan sebesar Rp dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapuskan sebagai berikut :

Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Akumulasi Penyusutan Barang Hibah Keluar yang Belum Dihapus				
Jumlah				

Barang hibah keluar yang belum dihapus merupakan barang yang telah dihibahkan kepada namun sampai dengan akhir tahun 2021 belum dihapuskan.

- 3) Barang berlebih yang belum dinilai sebesar Rp , dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian Barang	Jumlah Barang	Satuan	Harga Satuan	Nilai (Rp)
Jumlah				

Mutasi Barang berlebih belum dinilai sebagai berikut :

Uraian Barang	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021

Jumlah				

d. Akumulasi Penyusutan Barang Rusak Berat/TD

Uraian	Saldo 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo 2021
Jumlah				

Mutasi Akumulasi Penyusutan Aset Barang RB/TD merupakan Reklasifikasi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap yang RB/TD dijelaskan sebagai berikut :

- 1) Penambahan karena pindah kondisi dari Barang Baik (B) ke Rusak Berat (RB) sebesar Rp .
- 2) Penambahan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .
- 3) Pengurangan karena penghapusan sebesar Rp .
- 4) Pengurangan karena koreksi salah catat saldo tahun sebelumnya sebesar Rp .

3.4.2 Kewajiban

3.4.2.1 Kewajiban Jangka Pendek

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu kurang dari satu tahun sejak tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, dengan saldo masing-masing sebesar Rp. 61.364.366 dan Rp. 42. 251. 747 dapat dirinci sebagai berikut :

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK :	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	-	-
Utang Bunga	-	-
Utang Pinjaman Jangka Pendek	-	-
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	-	-
Pendapatan Diterima Dimuka	-	-
Utang Belanja	61.364.366,00	30.213.897,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	-	12.037.850,00
Jumlah	61.364.366,00	42.251.747,00

1. Utang Perhitungan Fihak Ketiga

Saldo rekening Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) sebesar Rp merupakan :

- a. Pajak yang dipungut oleh Bendahara Pengeluaran akan tetapi belum disetorkan ke Kas Negara, berupa
 - 1) Pajak.....sebesar Rp
 - 2) Pajak..... sebesar Rp
- b. Potongan Gaji yang belum disetorkan kepada pihak ke-3, berupa :
 - 1) Taspen sebesar Rp
 - 2) Iurang Jaminan Kesehatan sebesar Rp
 - 3) Iurang Jaminan Kecelakaan Kerja sebesar Rp
 - 4) Iurang Jaminan Kecelakaan Kematian sebesar Rp
 - 5) Taperum sebesar Rp
 - 6) Iuran Wajib Pegawai sebesar Rp
- c. Belanja yang telah direalisasikan namun belum dibayar kepada pihak ke-3 dan kas nya masih berada di rekening Kas Bendahara Pengeluaran sebesar Rp
- d. *Dst (disesuaikan dengan kondisi SKPD)*

2. Utang Bunga

Utang Bunga merupakan reklasifikasi bagian lancar dari bunga pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2021 adalah NIHIL

3. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan Diterima Dimuka merupakan kewajiban yang timbul karena adanya kas yang telah diterima tetapi sampai dengan tanggal neraca seluruh atau sebagian barang/jasa belum diserahkan kepada pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka sebesar per 31 Desember 2021 sebesar Rp

Uraian Pendapatan Diterima di Muka	Saldo Th. 2020	Penambahan	Pengurangan	Saldo Th. 2021
Jumlah				

Mutasi pendapatan diterima dimuka tahun 2021 dijelaskan dalam tabel sebagai berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Uraian Kegiatan :	
Penerimaan pendapatan, diterima pada tanggal untuk jangka waktu	
Saldo Awal	
Penambahan :	

Uraian	Nilai (Rp)
a. Penambahan PDDM tahun 2021	
b. Koreksi tambah salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Penambahan	
Pengurangan :	
a. PDDM tahun sebelumnya yang telah menjadi pendapatan tahun 2021	
b. Koreksi kurang salah catat saldo tahun sebelumnya	
Jumlah Pengurangan	
Saldo Akhir	

4. *Bagian Lancar Utang Jangka Panjang*

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan reklasifikasi bagian lancar dari pinjaman jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam satu tahun anggaran. dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar Rp dan Rp .

5. *Utang Belanja*

Utang Belanja merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Beban Pegawai dan Beban Barang tahun anggaran sebelumnya namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 61.364.336 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Saldo Th. 2021	Saldo Th. 2020
Utang Belanja Pegawai	59.520.516,00	28.500.000,00
Utang Belanja Barang dan Jasa – Persediaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa – Pemeliharaan		
Utang Belanja Barang dan Jasa – Jasa	1.843.820,00	1.713.897,00
Utang Belanja Barang dan Jasa - Perjalanan Dinas		
Utang Belanja Bunga		
Utang Belanja Subsidi		
Utang Belanja Hibah		
Utang Belanja Tidak Terduga		
Utang Belanja Bagi Hasil		
Utang Belanja Bantuan Keuangan		
Utang Belanja Bantuan Sosial		
Utang Beban Lain-lain		
Jumlah	61.364.336,00	30.213.897,00

Utang Belanja tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Penambahan :

- a. Utang Belanja Pegawai merupakan :

- 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 59.520.516**
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan:
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan:
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan :
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar **Rp. 63.572**
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar **Rp. 45.300**
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar **Rp. 500.000**
 - 4) Utang atas belanja Jasa Listrik sebesar **Rp. 1.054.948**
 - 5) Utang atas belanja Jasa Surat Kabar sebesar **Rp. 180.000**
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp
2. Pengurangan :
- a. Utang Belanja Pegawai merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang TPP bulan Desember 2021 sebesar **Rp. 28.500.000**
 - 2) Utang Upah Pungut Pajak/retribusi triwulan IV sebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - b. Utang Belanja Barang/Persediaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas pengadaan obat-obatan sebesar Rp
 - 2) Utang atas pengadaan sebesar Rp
 - 3) Utang atas pengadaan natura dan pakan sebesar Rp
 - c. Utang Belanja Pemeliharaan merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut :
 - 1) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 2) Utang atas Pemeliharaansebesar Rp
 - 3) Koreksi salah catat tahun sebelumnya sebesar Rp
 - d. Utang Belanja Jasa merupakan pembayaran dan koreksi catat utang belanja tahun sebelumnya sebagai berikut:
 - 1) Utang atas belanja Telepon sebesar **Rp. 61.487**
 - 2) Utang atas belanja Air sebesar **Rp. 45.300**
 - 3) Utang atas belanja Internet sebesar **Rp. 500.000**
 - 4) Utang atas belanja Jasa Listrik sebesar **Rp. 927.110**
 - 5) Utang atas belanja Jasa Surat Kabar sebesar **Rp. 180.000**
 - e. Utang Belanja Perjalanan Dinas sebesar Rp

6. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya merupakan kewajiban Pemerintah Kabupaten Brebes terkait dengan Belanja Modal yang tidak dapat dikategorikan sebagai Utang Belanja

namun belum diselesaikan. Saldo utang ini per 31 Desember 2021 dan 2020 masing-masing sebesar Rp. 0 dan Rp. 12.037.850 .

Utang jangka pendek tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Utang saldo tahun lalu sebesar Rp merupakan utang retensi aset tetap yang telah dikoreksi dan telah dihapuskan berdasarkan keputusan bupati nomor, sehingga saldo tahun 2021 sebesar NIHIL
2. Utang karena Putus Kontrak atas pekerjaan fisik dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

Uraian KDP	Nama Rekanan	Nilai Kontrak	Kemajuan Fisik (%)	Nilai KDP	Kemajuan Keuangan (Rp)	Utang Aset Belum Dibayar
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Pekerjaan						
Jumlah						

Penjelasan atas kemajuan fisik pekerjaan telah dijelaskan pada penjelasan Aset Tetap dhi. Kontruksi Dalam Pengerjaan (KDP).

3.4.2.2 Kewajiban Jangka Panjang

Rekening ini menggambarkan jumlah kewajiban yang jatuh tempo lebih dari satu tahun anggaran dengan saldo per 31 Desember 2021 dan 2020 sebesar NIHIL.

3.4.2.3 R/K PPKD

Rekening ini merupakan rekening perantara yang digunakan oleh SKPD pada saat menerima SP2D dari BUD atau menyeter kas ke BUD. Saldo R/K PPKD sebelum konsolidasi per 31 Desember 2021 adalah sebesar NIHIL.

3.4.3 Ekuitas

Rekening ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang menunjukkan hak Pemerintah Daerah terhadap aset yang dikuasai, setelah dikurangi hak pihak (*claim*) ketiga terhadap aset tersebut. Hak pihak ketiga ini merupakan kewajiban yang harus diselesaikan meliputi kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Ekuitas pada Neraca Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes per 31 Desember 2021 dan 2020 adalah sebesar Rp 1.847.014.636 dan Rp. 1.759.832.330. Perubahan atas ekuitas tahun 2021 dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

PERUBAHAN EKUITAS TAHUN 2021 :	NILAI (Rp)
--------------------------------	------------

EKUITAS AWAL	1.847.014.636,00
Surplus/(Defisit)-LO	(2.732.963.250,00)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KEALAHAN MENDASAR :	
Koreksi Nilai Persediaan /Ekuitas	13.597.851,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	
Lain-lain /Kewajiban yang dikonsolidasikan	2.586.157.027,00
EKUITAS AKHIR	1.713.806.264,00

Surplus/(Defisit) - LO berasal dari selisih Pendapatan dengan Beban. Lebih terperinci mengenai Pendapatan dan Beban dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Operasional.

Lebih terperinci mengenai perubahan ekuitas dijelaskan pada penjelasan mengenai Laporan Perubahan Ekuitas.

3.5 Pengungkapan atas pos-pos aset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan basis kas, untuk entitas akuntansi/entitas pelaporan yang menggunakan basis akrual pada Pemda.

Nilai surplus/(defisit) pada Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2021 sebesar Rp. (2.586.157.027). Sedangkan nilai Surplus Defisit-LO sebesar Rp. (2.732.963.250) sehingga memiliki perbedaan sebesar Rp. 146.806.223. Perhitungan perbedaan nilai secara keseluruhan hubungan LRA-LO dijelaskan dalam tabel berikut :

Uraian	Nilai (Rp)
Surplus/(Defisit) LRA	(2.586.157.027,00)
Penambahan	100.710.097,00
Pengurangan	247.516.320,00
Surplus/(Defisit) LO	(2.732.963.250,00)

Adapun penjelasan penambahan dan pengurangan disampaikan dalam **lampiran 3.5.1**

<u>Penambahan LRA-LO :</u>			
No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	aset tetap	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tetap PEG+	
2	aset tetap	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tetap JS+	
3	aset tetap	Jurnal pengeluaran persediaan reklasifikasi ke Aset Tetap BHP+	
4	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Belanja Pemeliharaan ke Aset Tetap PEMEL+	
5	aset tetap	Jurnal pengeluaran persediaan diserahkan kepada pihak ke-3 direklasifikasi ke Aset Tetap BHP+3	
6	aset lainnya	Jurnal reklasifikasi beban jasa ke aset tidak berwujud	

7	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Jaminan Pelaksanaan (baru)	
8	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Denda Keterlambatan	
9	piutang	Jurnal pencatatan pembebanan Piutang TGR th 2021 a.n (SK Bupati No.....)	
10	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Pajak baru	
11	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Denda Pajak	
12	piutang	Jurnal pencatatan Piutang Retribusi baru	
13	piutang	Jurnal pencatatan Piutang BLUD tahun ini (baru)	
14	utang beban	Jurnal pembayaran utang belanja tahun lalu	30.213.897,00
15	persediaan	Jurnal saldo akhir Persediaan Tahun 2021	1.043.400,00
16	persediaan	Jurnal mutasi keluar barang persediaan ke SKPD/Unit	
17	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (tambah)	
18	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (tambah)	
19	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (tambah)	
20	persediaan	Jurnal penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
21	persediaan	Jurnal pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (tambah)	
22	persediaan	Jurnal reklasifikasi antar kode beban persediaan (tambah)	69.452.800,00
23	persediaan	Jurnal reklasifikasi persediaan ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
24	BBDM	Jurnal penyesuaian Beban Jasa tahun ini yang merupakan Belanja Dibayar di Muka	
25	BBDM	Jurnal penyesuaian Pendapatan Diterima di Muka saldo tahun lalu yang telah menjadi Pendapatan – LO	
26	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BOS (tambah)	
27	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (tambah)	
28	beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BOS (tambah)	
29	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BLUD (tambah)	
30	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (tambah)	
31	beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BLUD (tambah)	
32	beban	Jurnal reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (tambah)	
33	eliminasi hutang/piutang	Jurnal eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
34	penjualan AT PPKD	Jurnal Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (tambah)	
35	PMPD	Jurnal pencatatan Penyesuaian saldo PMPD th 2021 akibat perhitungan dengan metode ekuitas	
36	Utang Jangka Pendek	Jurnal eksekusi jaminan pemeliharaan (retensi) dari utang jangka pendek ke pendapatan hasil eksekusi jaminan PPKD	-
37	Beban Tidak Terduga	Jurnal pengalihan Belanja Tidak Terduga PPKD ke Beban Persediaan SKPD teknis	
38	Utang DBH Pusat	Jurnal pemotongan pendapatan DBH pusat untuk pembayaran Utang Lebih Bayar DBH	

39	Piutang DBH Pusat	Jurnal penetapan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat sesuai PMK ...	
40	Piutang DBH Pusat	Jurnal penetapan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat sesuai PMK ...	
41	Piutang DBH Prov	Jurnal penetapan Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi TA 2021 sesuai BA Rekonsiliasi Nomor	
42	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2021	
43	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal pencatatan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan)TA 2021	
		dst	
		Jumlah	100.710.097,00
		<u>Pengurangan LRA-LO :</u>	
No	Jenis Transaksi	Uraian	Nilai (Rp)
1	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah pusat (.....) HBM+P	
2	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pemerintah provinsi (.....)HBM+V	
3	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari pihak ke-3 (.....) HBM+3	
4	aset tetap	Jurnal pencatatan hibah masuk aset tetap dari komite sekolah HBM+KOM	
5	aset tetap	Jurnal penerimaan persediaan dari reklasifikasi Belanja Modal - BHP-	
6	aset tetap	Jurnal penerimaan persediaan dari reklasifikasi Aset Tetap (hasil mutasi dari SKPD/Unit lainnya) - BHP-	
7	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Belanja Modal/Aset Tetap ke Beban Pemeliharaan - PEMEL-	
8	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Perjalanan Dinas - PD-	
9	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Pegawai - PEG-	
10	aset tetap	Jurnal reklasifikasi Aset Tetap ke Beban Jasa - JS-	
11	aset tetap	Jurnal Hibah Keluar Aset Tetap kepada (BAST No.....) – HB	
12	aset tetap	Jurnal reklasifikasi barang diserahkan kepada pihak ke-3 pengadaan tahun 2020, salah penganggaran ke Belanja Modal - HB-3	
13	penyusutan AT	Jurnal pencatatan Beban Penyusutan tahun 2021	113.017.984,00
14	penyusutan AT	Jurnal reklasifikasi antar beban penyusutan, salah kode rekening	
15	aset lainnya	Jurnal pencatatan Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud	
16	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap atas penjualan barang RB (SK hapus no..... SK jual no)	
17	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap atas pemusnahan barang RB (SK hapus no..... SK jual no)	

18	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Tetap Rusak Berat tukar/menukar (SK hapus no.....)	
19	aset lainnya	Jurnal Penghapusan Aset Lainnya atas barang HIBAH keluar (SK hapus no..... BAST no	
20	piutang	Jurnal pengembalian piutang jasa ex-Dana Bergulir, penerimaan kas di PPKD	
21	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Jasa Ex-Dana Bergulir	
22	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pokok Ex-Dana Bergulir	
23	piutang	Jurnal penerimaan Piutang Jaminan Pelaksanaan, penerimaan kas di PPKD	
24	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda keterlambatan	
25	piutang	Jurnal pengurangan Bagian Lancar TGR, penerimaan kas di PPKD	
26	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang TGR	
27	piutang	Jurnal penerimaan piutang pajak tahun lalu	
28	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Pajak	
29	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Denda Pajak	
30	piutang	Jurnal penerimaan piutang retribusi tahun lalu	
31	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penambahan Penyisihan Piutang Retribusi	
32	piutang	Jurnal penerimaan Piutang BLUD saldo tahun lalu	
33	piutang	Jurnal pengurangan Piutang BLUD yang tidak lolos verifikasi	
34	penyisihan piut	Jurnal pencatatan Penyisihan Piutang BLUD	
35	utang beban	Jurnal pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (non persediaan)	61.364.336,00
36	utang beban	Jurnal pencatatan utang belanja tahun ini yang belum dibayar (persediaan)	
37	persediaan	Jurnal koreksi saldo persediaan awal	
38	persediaan	Jurnal penggunaan/pemakaian saldo Persediaan awal	3.681.200,00
39	persediaan	Jurnal mutasi masuk barang persediaan dari SKPD/Unit ...	
40	persediaan	Jurnal reklasifikasi persediaan ke ekstrakomtabel	
41	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari pemerintah pusat	
42	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari pemerintah provinsi	
43	persediaan	Jurnal hibah masuk barang persediaan dari lembaga/organisasi swasta	
44	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok individu (kurang)	
45	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada kelompok masyarakat (kurang)	
46	persediaan	Jurnal bantuan sosial barang persediaan kepada Lembaga Non Pemerintahan Bidang (Pendidikan, Keagamaan dan Bidang Lainnya) (kurang)	
47	persediaan	Jurnal penerimaan persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
48	persediaan	Jurnal pengeluaran persediaan karena reklasifikasi antar beban (kurang)	
49	persediaan	Jurnal reklasifikasi antar kode beban persediaan	69.452.800,00

		(kurang)	
50	persediaan	Jurnal Penerimaan Beban Persediaan SKPD dari Belanja Tidak Terduga PPKD	
51	BBDM	Jurnal penyesuaian Belanja Dibayar di Muka tahun lalu yang telah menjadi Beban Jasa	
52	PPDM	Jurnal penyesuaian Pendapatan -LO tahun ini yang merupakan Pendapatan Diterima di Muka	
53	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BOS (kurang)	
54	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BOS (non persediaan) (kurang)	
55	Beban BOS	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BOS (kurang)	
56	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban pegawai BLUD (kurang)	
57	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban barang dan jasa BLUD (non persediaan) (kurang)	
58	Beban BLUD	Jurnal reklasifikasi beban persediaan BLUD (kurang)	
59	Beban	Jurnal reklasifikasi antar beban karena salah penganggaran (kurang)	
60	Kas	Jurnal penyesuaian atas setoran kas di bendahara penerimaan ke Kas Daerah	
61	eliminasi hutang/piutang	Jurnal eliminasi Hutang/Piutang Pelayanan Kesehatan Jamkesda (SKTM)	
62	Penjualan AT PPKD	Jurnal Reklasifikasi hasil penjualan aset tetap SKPD (kurang)	
63	Penerimaan TGR PPKD	Jurnal penerimaan piutang TGR Khusus PPKD	
64	Penerimaan TGR PPKD	Jurnal penerimaan aset lainnya TGR Khusus PPKD	
65	Utang DBH Pusat	Jurnal pencatatan Utang Lebih Bayar DBH sesuai Perdirjen PK no	
66	Piutang DBH Pusat	Jurnal penerimaan Piutang Bagi Hasil Pajak Pusat	
67	Piutang DBH Pusat	Jurnal penerimaan Piutang Bagi Hasil SDA Pusat	
68	Penyisihan Piutang DBH Pusat	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak/SDA Pusat	
69	Piutang DBH Prov	Jurnal penerimaan piutang Dana Bagi Hasil Provinsi	
70	Penyisihan Piutang DBH Prov	Jurnal pencatatan Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil Pajak Provinsi	
71	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Lembaga Keuangan TA 2020	
72	Piutang Bagian Laba BUMD	Jurnal penerimaan Piutang Bagian Laba atas Penyertaan Modal BUMD Aneka Jasa (non lembaga keuangan) TA 2020	
73	Penyisihan Piutang Laba BUMD	Jurnal pencatatan penyisihan piutang bagian laba/deviden atas PMPD pada BUMD	
		dst	
		Jumlah	247.516.320,00

3.5.1 Penjelasan masing-masing pos terkait perbedaan pengakuan antara Laporan Realisasi Anggaran dengan Laporan Operasional Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

3.5.1.1 Pengungkapan Perbedaan Pendapatan-LO dengan Pendapatan-LRA

Pendapatan Daerah	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Asli Daerah (PAD)			
Pendapatan Transfer/Dana Perimbangan			
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah			
Jumlah			

1. PENDAPATAN ASLI DAERAH

Selisih antara Pendapatan Asli Daerah-LO dengan Pendapatan Asli Daerah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
PENDAPATAN ASLI DAERAH			

a. Pendapatan Pajak Daerah

Selisih antara Pendapatan pajak-LO dengan pendapatan pajak-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang pajak th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Pendapatan Retribusi Daerah

Selisih antara pendapatan retribusi-LO dengan pendapatan retribusi-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Retribusi Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang retribusi th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	

Pengurangan atas pembayaran piutang retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan yang merupakan pendapatan diterima dimuka	
Selisih	

c. Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang bagian laba/deviden th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piutang bagian laba/deviden tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Lain-lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Lain-lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang denda pajak th. 2021	
Penambahan piutang denda retribusi th. 2021	
Penambahan piutang denda keterlambatan pekerjaan th. 2021	
Penambahan piutang pendapatan BLUD th. 2021	
Penambahan piutang pendapatan th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. pokok dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. jasa dana bergulir tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda pajak tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda retribusi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. denda keterlambatan pekerjaan tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2. PENDAPATAN TRANSFER

Selisih Pendapatan Transfer pada Laporan Operasional dan LRA

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak pusat th. 2021	
Penambahan piutang dana bagi hasil SDA pusat th. 2021	
Penambahan piutang pendapatan th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil pajak pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bagi hasil SDA pusat tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Pendapatan Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Transfer Antar Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang dana bagi hasil pajak provinsi th. 2021	
Penambahan piutang bantuan keuangan prov th. 2021	
Penambahan piutang pendapatan th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran piut. Dana bagi hasil provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. Bantuan keuangan provinsi tahun sebelumnya	
Pengurangan atas pembayaran piut. tahun sebelumnya	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3. LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH

a. Pendapatan Hibah

Selisih antara Pendapatan Hibah-LO dengan Pendapatan Hibah-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Pendapatan Hibah-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2021	
Penambahan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2021	
Penambahan Hibah Masuk Persediaan	
Penambahan Hibah Masuk Aset Tetap	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat th. 2021	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Pemerintah Daerah Lainnya/Prov th. 2021	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah dari Kelompok Masyarakat/Perorangan Dalam Negeri th. 2021	
Pengurangan atas penerimaan piutang Sumbangan Pihak ketiga/sejenis th. 2021	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	-

b. Dana Darurat

Selisih antara Dana Darurat-LO dengan Dana Darurat-LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Dana Darurat-LO			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Dana Darurat th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Dana Darurat th. 2021	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

c. Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

Selisih antara Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LO dengan Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan - LRA

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
--------	-----------	------------	---------

Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan-LO			
--	--	--	--

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS th. 2021	
Penambahan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan Hibah Dana BOS th. 2021	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pendapatan atas Pengembalian Hibah th. 2021	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4. SURPLUS NON OPERASIONAL

a. Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

1) Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan reklasifikasi hasil penjualan BMD ke Surplus Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan th. 2021 (<i>khusus PPKD</i>)	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih penjualan barang RB BMD	
Pengurangan selisih penghapusan/pemusnahan BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
--------	------

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pertukaran BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Panjang dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan selisih tukar-menukar BMD	
Pengurangan selisih hibah BMD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek – LO			

Selisih Surplus Pelepasan Investasi Jangka Pendek dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas penerimaan piutang Pelepasan Investasi Jangka Pendek th. 2021	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

1) Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan surplus penyelesaian utang pemerintah pusat th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

2) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bank th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

3) Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			

Surplus Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Utang kepada LK. Bukan Bank th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

4) Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO			

Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Surplus Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi-LO th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

5) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO			

Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO dijelaskan sebagai berikut :

3.2.2 Pengungkapan Perbedaan Beban-LO dengan Belanja-LRA

3.2.2.1 BEBAN OPERASI

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai	2.187.995.472,00	2.156.974.956,00	31.020.516,00
Beban Barang dan Jasa	431.949.794,00	429.182.071,00	2.767.723,00
Beban Bunga	-	-	-
Beban Subsidi	-	-	-
Beban Hibah	-	-	-
Beban Bantuan Sosial	-	-	-
Beban Penyisihan Piutang	-	-	-
Beban Lain-lain	-	-	-
Jumlah	2.619.945.266,00	2.586.157.027,00	33.788.239,00

1. Beban Pegawai

Selisih Beban Pegawai pada LO dan Belanja Pegawai pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Gaji dan Tunjangan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan ASN	1.465.491.545,00	1.465.491.545,00	-

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

b. Beban Tambahan Penghasilan ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan ASN	722.503.927,00	691.483.411,00	31.020.516,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN th. 2021	59.520.516,00
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan ASN	28.500.000,00
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	31.020.516,00

c. Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

d. Beban Gaji dan Tunjangan DPRD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan DPRD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan DPRD	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

e. Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

f. Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH th. 2021	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	
Pengurangan koreksi catat ...	
Selisih	

g. Beban Pegawai BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan koreksi catat ...	

Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

h. Beban Pegawai BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pegawai BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan koreksi catat ...	
Penambahan koreksi catat ...	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

2. Belanja Barang dan Jasa

Selisih beban barang dan jasa pada LO dengan belanja barang dan jasa pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Persediaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang	141.031.160,00	138.393.360,00	2.637.800,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Saldo Awal Persediaan 2021	3.681.200,00
Penambahan Koreksi Saldo Awal	
Penambahan Reklas dari Belanja Tak Terduga	
Penambahan Reklas Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Mutasi Masuk	
Penambahan Hibah Masuk	
Penambahan Hutang Persediaan	
Saldo Akhir Persediaan 2021	1.043.400,00
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Persediaan	
Pengurangan Koreksi Saldo Awal	
Pengurangan Mutasi Keluar	
Pengurangan Hibah Keluar	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	

Pengurangan Reklas ke Ekstrakomptabel	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Kadaluarsa/Usang/Rusak	
Selisih	2.637.800,00

b. Beban Jasa

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Jasa	216.947.016,00	216.817.093,00	129.923,00

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Jasa	1.843.820,00
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka\	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Jasa	1.713.897,00
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Dibayar di Muka	
Selisih	129.923,00

c. Beban Pemeliharaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan	26.535.000,00	26.535.000,00	-

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Pemeliharaan	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	

Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

d. Beban Perjalanan Dinas

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Perjalanan Dinas	47.436.618,00	47.436.618,00	-

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Perjalanan Dinas	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

e. Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	

Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

f. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

g. Beban Barang dan Jasa BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	

Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

h. Beban Barang dan Jasa BLUD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Barang dan Jasa BLUD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Pemeliharaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Perjalanan Dinas	
Pengurangan Reklas ke Beban Hibah	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Pengurangan Reklas dari Beban Dibayar di Muka	
Selisih	

3. Belanja Bunga

Selisih beban bungaLO dengan belanja bunga pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat	

Selisih	
---------	--

b. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Pemerintah Daerah Lain	
Selisih	

c. Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)	
Selisih	

d. Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang atas	

Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)	
Selisih	

e. Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Kepada Masyarakat	
Selisih	

f. Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman melalui BLUD- Jangka Pendek	
Selisih	

g. Beban Bunga Utang Pinjaman

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bunga Utang Pinjaman			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bunga Utang Pinjaman	

Uraian	(Rp)
Selisih	

4. Beban Subsidi

Selisih beban subsidi LO dengan belanja subsidi pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Subsidi kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMN	
Selisih	

b. Beban Subsidi kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada BUMD	
Selisih	

c. Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Pengurangan Koreksi Catat ...	

Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Badan Usaha Milik Swasta	
Selisih	

d. Beban Subsidi kepada Koperasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Subsidi kepada Koperasi			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Subsidi kepada Koperasi	
Selisih	

5. **Beban Hibah**

Selisih Beban Hibah LO dengan Belanja Hibah pada LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Pusat	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Pusat	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	

Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Pusat	
Selisih	

b. Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Pem. Daerah Lainnya	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Pem. Daerah Lainnya	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya	
Selisih	

c. Beban Hibah kepada BUMN

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada BUMN			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklas dari Belanja Modal	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap (Hasil Mutasi)	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	

Penambahan Reklas dari Beban Pemeliharaan	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMN	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMN	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke B. Persediaan	
Pengurangan Reklas ke B. Pegawai	
Pengurangan Reklas ke B. Jasa	
Pengurangan Reklas ke B. Pemeliharaan	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada BUMN	
Selisih	

d. Beban Hibah Uang kepada BUMD

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Uang kepada BUMD			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke BUMD	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah Uang kepada BUMD	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Selisih	

e. Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Hutang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Reklas dari Aset Tetap	
Penambahan Reklas dari Beban Persediaan	
Penambahan Reklas dari Beban Pegawai	
Penambahan Reklas dari Beban Jasa	
Penambahan Hibah Keluar barang persediaan ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Penambahan Hibah Keluar barang Aset Tetap ke Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas pembayaran Utang Beban Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	
Pengurangan Reklas ke Aset Tetap	
Pengurangan Reklas ke Beban Persediaan	
Pengurangan Reklas ke Beban Pegawai	
Pengurangan Reklas ke Beban Jasa	
Pengurangan Reklas ke Beban Bantuan Sosial	
Selisih	

f. Beban Hibah Dana BOS

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Dana BOS			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

g. Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

6. Beban Penyisihan Piutang

Selisih Beban Penyisihan Piutang LO dengan LRA dijelaskan sebagai berikut :

a. Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Pajak Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

b. Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Retribusi Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Retribusi Daerah atas penerimaan piutang	
Selisih	

c. Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan - Piutang Bag. Laba yang diagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	
Pengurangan Koreksi Catat ...	

Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Hasil Pengelolaan atas penerimaan Piutang Bag. Laba yang biagikan kpd Pemda (Deviden) atas Penyertaan Modal pd BUMD	
Selisih	

d. Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan BLUD	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - TP-TGR	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah - Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang BLUD	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Eksekusi Atas Jaminan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Pokok)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Hasil Pengelolaan Dana Bergulir (Jasa)	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang TPTGR	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Pajak Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lain-Lain PAD yang Sah atas penerimaan piutang Pendapatan Denda Retribusi Daerah	
Selisih	

e. Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Insentif Daerah	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat - Dana Desa	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Perimbangan	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Insentif Daerah	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Pemerintah Pusat atas penerimaan piutang Dana Desa	
Selisih	

f. Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah - Bagi Hasil Pajak Prov	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Transfer Antar Daerah atas penerimaan piutang Bagi Hasil Pajak Prov	
Selisih	

g. Beban Penyisihan Piutang Lainnya

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyisihan Piutang Lainnya			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyisihan Piutang Lainnya - Bagian Lancar TGR	

Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan Beban Penyisihan Piutang Lainnya atas penerimaan piutang Bagian Lancar TGR	
Selisih	

3.2.2.2 BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI

Beban Penyusutan dan Amortisasi hanya diakui pada Laporan Operasional dan tidak dicatat pada Laporan Realisasi Anggaran.

1. Beban Penyusutan

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin			
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan			
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi			
Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya			
Beban Penyusutan Aset Lainnya			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Penyusutan th. 2021	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

2. Beban Amortisasi

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Beban Amortisasi th. 2021	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban Penyusutan (kurang)	
Selisih	

3.2.2.3 BEBAN TRANSFER

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil			
Beban Bantuan Keuangan			
Jumlah			

1. Beban Bagi Hasil

Selisih Beban Bagi Hasil LO dan Belanja Bagi Hasil LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa			
Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa th. 2021	
Penambahan Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa th. 2021	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

2. Beban Bantuan Keuangan

Selisih Beban Bantuan Keuangan LO dan Belanja Bantuan Keuangan LRA adalah sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan antar Daerah Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi ke Kabupaten/Kota			
Beban Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi			
Beban Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota ke Desa			
Beban Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi kepada Kabupaten/Kota			

Beban Transfer Bantuan Kepada Partai Politik			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa th. 2021	
Penambahan Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik th. 2021	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (tambah)	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Desa	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Bantuan Keuangan ke Partai Politik	
Penambahan Reklasifikasi antar kode Beban (kurang)	
Selisih	

3.2.2.4 BEBAN TIDAK TERDUGA

Selisih Beban Tidak Terduga LO dan Belanja Tidak Terduga LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Beban Tidak Terduga			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Pengurangan atas Pembayaran Utang Beban Tidak Terduga	
Pengurangan Reklasifikasi ke Beban Persediaan	
Selisih	

3.2.2.5 DEFISIT NON OPERASIONAL

1. Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO

Selisih Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan- LO			
Defisit Tukar Menukar BMD yang Tidak Dipisahkan-LO			
Defisit Pelepasan Investasi Jangka Panjang-LO			

Jumlah			
---------------	--	--	--

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Penjualan BMD Th 2021	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

2. Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO

Selisih Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO dengan LRA sebagai berikut :

Uraian	Jumlah LO	Jumlah LRA	Selisih
Defisit Penyelesaian Utang kepada Pemerintah Pusat-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)-LO			
Defisit Penyelesaian Utang kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-LO			
Defisit Penyelesaian Obligasi-LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO			
Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO			
Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO			
Jumlah			

Selisih tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

Uraian	(Rp)
Penambahan Koreksi Catat ...	
Penambahan Defisit Utang Th 2021	
Penambahan Defisit Obligasi Th 2021	
Pengurangan Koreksi Catat ...	
Selisih	

BABIV

PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

4.1 UMUM

Kabupaten Brebes memiliki eksistensi untuk membangun kompetensi daerah yang berbeda saing dengan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki meliputi sumber daya manusi, ilmu pengetahuan dan teknologi demi peningkatan derajat kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes yang dijabarkan dalam Peraturan Bupati Brebes Nomor 102 Tahun 2016, Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes memiliki Tugas Pokok Menyusun Laporan Keuangan Tahun 2021

Visi dan Misi Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes tertuang dalam Restra 2020-2024, sebagai berikut :

Visi :

Menuju Brebes Unggul, Sejahtera dan Berkeadilan

Misi :

Membangun Masyarakat yang maju, sejahtera dan berkeadilan

4.2 ORGANISASI

Struktur Organisasi SKPD Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut :

Kepala Kantor Kecamatan Paguyangan (Camat) membawahi :

1. Sekretaris :
 - a. *Sub Bagian Program dan Keuangan;*
 - b. *Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.*
2. Kasi Pemerintahan dan Pelayanan Umum
3. Kasi Kesejahteraan Sosial
4. Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum
5. Kasi Pemberdayaan Masyarakat

4.3 PERSONALIA

Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes memiliki 30 personil, terdiri dari 1 orang Kepala Kantor Kecamatan Paguyangan (Camat), 1 orang Sekretaris Camat (Sekcam), 4 orang Kasi dan 2 orang Kasubag serta 15 orang staf di mana orang tersebut adalah PNS dan 7 orang adalah tenaga kontrak/tenaga harian lepas.

BAB V
PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan Kecamatan Paguyangan Kabupaten Brebes yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Brebes untuk Tahun Anggaran 2021. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan *fairness* dalam pengelolaan keuangan daerah.

CAMAT PAGUYANGAN
KABUPATEN BREBES

(Drs. HUSNI PRAMONO, A.P., M.Si)
NIP. 19740727 199311 1 001